



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN 2026



Alamat :

Jl. Cokroaminoto No. 22 Blitar

Telp. :

(0342) 801136

KATA PENGANTAR

Pada pemberi ini, kami selaku Timan Tang Maha Esa atau segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga dapat terwujud dokumen Rencana Kerja (Renja) RPJPD Dan Perencanaan dan Pelaksanaan Kabupaten Elter Tahun 2026.

Diharapkan dan Perencanaan Kabupaten Elter sebagai salah satu Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab memimpin dan mengatur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dan perikanan sehingga memajukan berbagai masalah dan tantangan. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut, maka diperlukan perencanaan yang akurat, komprehensif dan akurat agar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraan dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Perencanaan tersebut tertuang dalam Rencana Strategis yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan sesuai misi 5 (lima) tahun yang selanjutnya ditindaklanjuti menjadi Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa dokumen ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Namun demikian kami yakin dengan terwujudnya dokumen Rencana Kerja, Dinas Perikanan dan Perikanan Kabupaten Elter tahun 2026 ini dapat dijadikan landasan dan pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Gambaran Kerja OGD	6
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN KERJA INFO TARIK LALU	11
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Pelayanan Daerah	13
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD	24
2.3 Durasi Ronting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	40
2.4 Kritik Terhadap Rancangan Awal RPO	50
2.5 Penjelasan Eviden Program dan Kegiatan Masyarakat	70
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	74
3.1 Tolakan Terhadap Kebijakan Nasional	74
3.2 Tujuan dan Sasaran Kerja Dinas Perencanaan dan Perikanan	77
3.3 Program dan Kegiatan	79
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENJAJARAN PERANGKAT DAERAH	80
BAB V. PENUTUP	88



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan langkah penting untuk menentukan arah kebijakan masa depan. Proses ini melibatkan berbagai pihak dan bertujuan untuk mengatur penggunaan sumber daya secara tepat dan efektif dalam jangka waktu tertentu, sehingga pembangunan di daerah bisa berjalan lebih terarah, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata masyarakat.

Sektor pertanian dan sub sektor peternakan merupakan bidang usaha yang crucial secara dan dijalankan oleh sebagian besar masyarakat di Kabupaten Bitar. Pembangunan di bidang ini memiliki pengaruh signifikan terhadap pembangunan ekonomi di Kabupaten Bitar. Kabupaten Bitar memiliki keunggulan komparatif sebagai daerah agraris yang menghasilkan dan budidaya berbagai tanaman, serta berbagai komoditas peternakan seperti telur, susu, dan daging. Oleh karena itu, pembangunan sektor pertanian dan sub sektor peternakan perlu menjadi prioritas utama untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini penting mengingat kontribusi sub sektor peternakan dalam pembentukan angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bitar.

Pembangunan sub sektor peternakan dan perikanan di Kabupaten Bitar perlu disusun dengan perencanaan yang sistematis oleh perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjenjang, meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu lima tahun, serta Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu satu tahun.

Pembangunan daerah disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Undang-undang tersebut mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, harus disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Perencanaan pembangunan daerah juga harus selaras dengan kebijakan sistem pemerintahan yang mengedepankan pemerintahan prinsip-prinsip: "Good Government" di setiap tingkat pemerintahan, guna mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara.

Elmas Peternakan dan Perikanan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara dalam rangka mewujudkan good government, dituntut untuk mampu memperlengkapviabilitas pelaksanaan tugas pokok dan



fungsi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dengan didasarkan pada perencanaan strategi. Perencanaan strategi tersebut meliputi Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Rencana SPD) untuk jangka waktu lima tahun dan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Rencana SKPD) untuk jangka waktu satu tahun. Rencana Binas Perencanaan dan Perikanan didasarkan dengan berpedoman pada RPJMD Pemerintah Kabupaten Ektar yang selanjutnya Rencana dijabarkan dalam perencanaan tahunan yaitu Rencana SPD.

Dinas Perikanan dan Perikanan Kabupaten Ektar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ektar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ektar bahwa Dinas Perikanan dan Perikanan Kabupaten Ektar mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan kebijakan yang Bupati di bidang perikanan dan perikanan. Dinas Perikanan dan Perikanan selanjutnya mempunyai manfaat sebagai berikut: dan dalam melaksanakan tugasnya melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Rencana Kerja Dinas Perikanan dan Perikanan merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menggambarkan permasalahan perikanan serta indikator daftar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2026. Rencana Kerja Dinas Perikanan merupakan perjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang dirincikan dalam kurun waktu satu tahun untuk menjadikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja Tahun 2026 Dinas Perikanan dan Perikanan Kabupaten Ektar merupakan dokumen yang berisi informasi tentang kegiatan atau target kinerja berbasis output atau outcome yang ingin diwujudkan pada tahun 2026.

Rencana Kerja tersebut merujuk kepada Rencana Strategis (Rencana) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ektar Tahun 2026. Rencana Kerja Tahun 2026 Dinas Perikanan dan Perikanan Kabupaten Ektar memiliki arah kebijakan pada pemertanian produktifitas ekonomi yang berorientasi ekspor dan perikanan pasar melalui penguatan SDM, infrastruktur dan stabilitas sosial politik sebagai upaya penguatan hamparan unggulan yang berorientasi industri ekspor dan perikanan pasar serta sebagai upaya penguatan infrastruktur dan sarana-prasarana pendukung subsektor unggulan serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana. Kegiatan pembangunan perikanan dan perikanan tahun 2026 dilaksanakan dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan usaha perikanan dan perikanan melalui peningkatan teknologi pengetahuan dan keterampilan masyarakat serta penguatan usaha perikanan dan perikanan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Rencana Kerja) Dinas Perikanan dan Perikanan adalah:

- a) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Kota Baru dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2790);
- c) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- d) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Persepsi Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

- Pembangunan Daerah (Lambaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).
- k) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lambaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
- l) Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Organisasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lambaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136).
- j) Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Banghalu - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selongkik WTA dan Lintas Selatan (Lambaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225).
- k) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lambaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10).
- l) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1212).
- m) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1514).
- n) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2018 tentang Efisiensi, Efektivitas, dan Kompletur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1447).
- o) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2020 tentang Efisiensi Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
- p) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2023 (Lambaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 1, Seri E).



- g) Peraturan Daerah Kabupaten Bitung Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bitung Tahun 2009-2025 (Lampiran Daerah Kabupaten Bitung Tahun 2008 Nomor 10/E);
- h) Peraturan Daerah Kabupaten Bitung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bitung Tahun 2021-2026 (Lampiran Daerah Kabupaten Bitung Tahun 2021 Nomor 2/E, Tambahan Lampiran Daerah Kabupaten Bitung Nomor 62);
- i) Peraturan Daerah Kabupaten Bitung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lampiran Daerah Kabupaten Bitung Tahun 2022 Nomor 3/D, Tambahan Lampiran Daerah Kabupaten Bitung Nomor 64);
- j) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 18 Seri E);
- k) Peraturan Bupati Nomor 106 Tahun 2022 tentang Hubungan, Susunan Organisasi, Urutan Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Perumahan dan Perlindungan Kabupaten Bitung;
- l) Peraturan Bupati Bitung Nomor 73 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Rencana) 2026 pada OPD ini dimaksudkan untuk:

- a) Memberikan arahan yang jelas bagi seluruh pegawai di lingkungan Dinas Perumahan dan Perlindungan Kabupaten Bitung dalam melaksanakan tugas dan pelayanannya kepada masyarakat, sehingga tercapai keseluruhan dan efektivitas dalam setiap kegiatan yang di sinikan;
- b) Menunjukkan prioritas pembangunan di daerah khususnya antara target kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Rencana OPD), sehingga tercapai keseluruhan dalam pencapaian tujuan pembangunan;
- c) Menunjukkan keadaan yang diinginkan dalam waktu satu tahun di akhir pertengahan [sukSES pertengahan] dan akhir pelaksanaan serta pertengahan. Hal ini dijabarkan dalam rangka kelancaran pembangunan jangka menengah, sehingga semua instansi dapat memajukan kinerja dan harapan masyarakat Kabupaten Bitung.



Tujuan dirumusnya Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 ini adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perencanaan dan Perikanan Kabupaten Elter, yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 atau sumber dana lainnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua inisiatif yang diambil selaras dengan mandat dan tanggung jawab dinas;
2. Menyusun program dan kegiatan yang terukur dan tepat sasaran, sehingga sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Ini penting untuk mencapai hasil yang maksimal dalam mendukung pembangunan sektor perikanan dan perikanan di Kabupaten Elter;
3. Menyediakan bahan masukan dan landasan yang kuat untuk penyusunan kegiatan tahun anggaran 2026. Rencana kerja ini akan menjadi acuan dalam merencanakan dan mengimplementasikan kegiatan di tahun mendatang, sehingga tercapai kesinambungan dan koherensi dalam pelaksanaan program-program dinas.

1.4. Sistematika Renja OPD

Penjajian dokumen Rencana Kerja Dinas Perencanaan dan Perikanan Kabupaten Elter Tahun 2026 sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 66 Tahun 2017, sekarang kerangkanya disusun menurut sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijabarkan mengenai gambaran umum penyusunan renja sebagai Renja PD agar selaras pada level lebih luasnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengantar ringkas tentang Renja PD, proses penyusunan Renja PD, keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen RKPD, Rencana PD dengan Renja K/L dan Renja provinsi/ Kabupaten/ kota, serta தொடர் தொடர் தொடர் dengan proses penyusunan E-APBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang GTK, kerangka PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana PD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana PD, serta urutan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana PD Tahun Lalu dan Capaian Rencana PD

Bab ini memuat kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana PD tahun lalu (tahun $n-2$) dan pencapaian capaian tahun berjalan (tahun $n-1$), mengacu pada APBD tahun kerjanya yang sebelumnya pada waktu penyusunan Rencana PD sudah diadopsi. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Rencana PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana PD tahun-tahun sebelumnya. Selain hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Rencana PD tahun lalu, dan realisasi Rencana PD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan PD dan/atau realisasi APBD untuk PD yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang diajarkan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/ kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/ kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/ kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpelewatnya atau melebihi target kinerja program/ kegiatan;
5. Insidensi yang timbul terhadap target capaian program Rencana PD; dan
6. Kebijakan/ tindakan preventif dan pengendalian yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.



2.2. Analisa Kinerja Pelayanan PD

Evaluasi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah diuraikan dalam RIFE dan IPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 jenis indikator yang diuji, diuraikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketepatan pemetaan perantara/ anggaran yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Dasar Perangkat Daerah yang bersangkutan dalam menguraikan tolak ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolak ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

2.3. Kajian Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Evaluasi uraian mengenai:

1. Sejahteranya tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD;
3. Kemampuannya terhadap pencapaian visi dan misi tingkat daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SDN dan SDGs (Sustainable Development Goals);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan arahan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam pemrosesan program dan kegiatan prioritas tahunan yang dilaksanakan;

2.4. Kajian terhadap Rancangan Awal RUPD

Evaluasi uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu perbandingan antara rancangan awal RUPD dengan hasil analisa kebutuhan;

2. Penjelasan mengenai alasan gratis tersebut dilakukan;
3. Penjelasan tujuan-tujuan setelah gratis tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RCFD, misalnya terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RCFD, atau program dan kegiatan masih sama besarnya berbeda dan

1.4 Penjelasan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan gratis, LDM, asosiasi/serikat, Pokok Fokus DPRD, perguruan tinggi maupun dari PD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada PD, maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi PD dari perwakilan lembaga dan organisasi pelaksanaan masyarakat kabupaten/ kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu diuraikan dalam subbab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang gratis bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan bagaimana usulan tersebut dikaitkan dengan suatu penting pencapaian tugas pokok dan fungsi PD.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PD

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Telaah terhadap kebijakan nasional dan atbagaimana dimandak yaitu penelaahan yang menyeluruh anak kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana PD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan (tujuan penting pencapaian peran tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Rencana Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Berikan penjelasan mengenai:

1. Faktor-

faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap
rumusan program dan kegiatan. Misi

- Pengawasan nilai dan nilai kepala daerah,
- Pengawasan SDGs,
- Pengawasan komitmen,
- Pengawasan IPM,
- Peningkatan gotong royong/daerah,
- Pengembangan daerah terasah, dan

2. Urutan garis besar mengenai rekapitulasi program dan
kegiatan, antara lain meliputi:

- Jumlah program dan jumlah kegiatan;
- Uraian penyusunan hasil program dan kegiatan (apa saja yang terdapat ke berbagai kawasan dan apa saja yang terdapat pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu);
- Total kebutuhan dana/ pagu indikatif yang dinilai memuat sumber pendanaannya.

3. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai
dengan rumusan awal RPMD, baik jenis program/
kegiatan, pagu indikatif, maupun kebutuhan kadernya.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDAYAAN PERANGKAT DAERAH

Berikan uraian pelaksanaan dari Tabel Rencana Program dan
Kegiatan.

BAB V. PENUTUP

Berikan uraian penutup, berupa:

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam
rangka pelaksanaannya maupun mandiriya keterbatasan
sugunan tidak sesuai dengan kebutuhan;
2. Kelemb-kelemb pelaksanaan;
3. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir disertakan tempat dan tanggal dihomoni,
nama PD dan nama dan tanda tangan kepala PD, serta cap pemerintah
daerah yang bersangkutan.



BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PERANGKAT DAERAH TAHUN LAIN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Rencana Perangkat Daerah

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah bertujuan untuk menilai dan mengukur efektivitas serta efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perencanaan dan Periklanan Kabupaten Elter selama satu tahun anggaran. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai apakah mana program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dapat mencapai target yang ditetapkan, serta mengidentifikasi berbagai hal-hal yang mempengaruhi pencapaian tersebut.

Tahun 2024 alokasi anggaran actual Dokumen Pelaksanaan Perumahan Anggaran (DPPA) Dinas Perencanaan dan Periklanan Kabupaten Elter (AD902 IU) sebesar Rp. 29.003.014.900,00 yang terdapat dalam 11 (sebelas) Program annual Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Dinas Perencanaan dan Periklanan Kabupaten Elter yang dikomodori kedalam Dokumen Pelaksanaan Perumahan Anggaran (DPPA) Dinas Perencanaan dan Periklanan Kabupaten Elter Tahun 2024. Realisasi penyerapan anggaran tahun 2024 adalah sebesar Rp. 18.228.216.714,- atau sebesar 62,85%, dengan rincian penyerapan program dan realisasi anggarannya tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 1
Rincian Capaian Program dan Realisasi Anggaran

No	NOMOR DAN URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	Jumlah Dana		Realisasi (%) Per		
		DAK (Rp)	DAK (Rp)	Program	Target	Realisasi
1	Program Pemenuhan Dasar Pemukiman Dasar Kabupaten Elter	8.021.702.000	8.110.748.000	Belum dapat menerima kegiatan yang program yang akan dilaksanakan	0%	0%
2	Program Penyediaan Fasilitas Target	228.450.000	270.000.000	untuk kegiatan pembangunan (M)	0,00	0,00
3	Program Penyediaan Fasilitas Publik	10.000.000	100.000.000	untuk kegiatan pembangunan fasilitas umum dan lain	10,00/100,00	10,00/100,00
4	Program Kegiatan Dunia Day (Globe dan Periklanan	8.000.000	8.700.000	Pembelian perlengkapan produksi	0	0,0
5	Program Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Periklanan	10.000.000	10.000.000	Pembelian peralatan produksi	10	10,0
6	Program Penyediaan dan Pengembangan Sistem Periklanan	1.000.000.000	1.000.000.000	Pembelian Penyediaan Sistem Periklanan (Sistem)	0,0	0,0
7	Program Penyediaan dan Pengembangan Fasilitas Periklanan	1.000.000.000	1.000.000.000	Pembelian peralatan produksi yang lengkap	10	10
8	Program Penyediaan dan Pengembangan Fasilitas Periklanan	1.000.000.000	1.000.000.000	untuk pembelian peralatan produksi	20,00	20,00

				Program Kerja Utama yang terdapat dalam anggaran yang terdapat		
2	Program Pengabdian dan Pengembangan Desa/Perkotaan	7.881.702	7.481.702	Program Pengabdian dan pengembangan desa/ perkotaan (Kendaraan)	100	100
3	Program Penelitian Ilmiah	2.889.800	2.889.800	Program Kerja Utama Penelitian yang terdapat	0	1
4	Program Penelitian	11.027.143	10.950.100	Program Penelitian (Penerjemahan)	0	0,2

Table 2.

Identifikasi Capaian Program

No	Program	Realisasi Capaian Identifikasi dengan Target			Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		Tahun Berencana	Realisasi	Salisih		
1.	Perwujudan Dampak Semesta/Desa/Perkotaan/ Desa/ Kabupaten/ Kota		1		Keterbatasan sumber daya yang ada dan kurangnya pendanaan dari para stakeholder yang baru diidentifikasi.	Mengembangkan sumber daya yang ada dan mencari dana untuk pembiayaan.
2.	Perubahan Berencana/Target	1			Daftar alamat dan perusahaan tidak ada, kurangnya informasi yang harus untuk membangun link dengan stakeholder yang ada pada program yang lebih tinggi.	Identifikasi stakeholder.
3.	Perubahan Berencana/Butang	1				
4.	Perwujudan Sumber Daya Manusia dan Peralatan	1			Kurangnya sumber daya yang terdapat di beberapa area seperti halnya mesin produksi atau alat.	Mengadakan pembelian dan perbaikan alat untuk meningkatkan produksi dan di tingkat PDD.
5.	Perubahan dan Pemenuhan Hasil Peralatan		1		-	-
6.	Perwujudan dan Pengembangan Desa/Perkotaan		1		-	-
7.	Perwujudan dan Pengembangan Desa/Perkotaan		1		-	-
8.	Perwujudan dan Pengembangan Desa/Perkotaan		1		-	-
9.	Perubahan dan Pemenuhan Hasil Peralatan		1		-	-

12	Persepsi Masyarakat Terhadap			1	-	-
----	------------------------------	--	--	---	---	---

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya terwujudnya atau melebihi target kinerja program/ kegiatan diraitkan sebagai berikut:

1. Program Peningkat Uraian Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Ketersediaan sumber daya yang tersedia, disertai dengan banyaknya permasalahan data serta tuntutan administratif yang harus dipenuhi, merupakan tantangan yang signifikan dalam mencapai target kinerja program/kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan upaya maksimal seluruh tim dalam mengoptimalkan potensi serta pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia secara efektif sehingga pada tahun 2023 capaian kinerja dapat tercapai dari target yang telah ditetapkan.

2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Program Pengelolaan Perikanan Tangkap pada Tahun 2024 dengan indikator jumlah produksi perikanan tangkap ditargetkan sebesar 3.352 ton, namun realisasinya mencapai 3.093 ton atau sebesar 92,27% dari target yang telah ditetapkan. Hal ini akibat pengaruh cuaca ekstrim yang tidak dapat diprediksi sehingga membatasi aktivitas penangkapan ikan di laut.

3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Pada tahun 2024 target ikan konsumsi adalah sebesar 17.500 ton dan tercapailah sebesar 17.331,3 ton (100%). Peningkatan produksi perikanan konsumsi ini dipengaruhi adanya peningkatan produksi budidaya dengan sistem tambak dan kolam. Hal ini diindikasikan melalui pengujian di Tahun 2024 yang menunjukkan pasokan air yang cukup membantu menciptakan kondisi optimal bagi pertumbuhan ikan budidaya dengan sistem kolam.

Produksi ikan budi pada tahun 2024 mengalami kenaikan sedikit dibandingkan tahun 2021. Dari target sebesar 104.700.000 ekor terrealisasi sebesar 104.017.074 ekor atau sebesar 100,01% dari target. Jika dibandingkan dengan tahun 2021 saat pandemi produksi ikan budi Kabupaten Situbone memang mengalami penurunan drastis dalam 5 (lima) tahun terakhir ini. Hal ini didorong oleh perlakuan kebijakan pemerintah pusat terhadap ikan budi, serta upaya Pemerintah Kabupaten Situbone dalam meningkatkan kembali minat seperti *Kopi Hitam*, yang berperan penting dalam meningkatkan konsumsi dan membangkitkan kesadaran masyarakat terhadap

4. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan memiliki indikator berupa pemantauan peningkatan produksi Perikanan Umum Darat (PID). Target yang ditetapkan sebanyak 5%, namun realisasi yang berhasil diupai sebesar

4456, dengan nilai produksi Fasilitas Umum Dasar (FUD) meningkat dari 285,2 ton pada tahun sebelumnya menjadi 288,8 ton pada tahun ini. Tidak tercapainya target ini disebabkan oleh menurunnya aktivitas ilegal fishing yang terjadi di perairan sekitar Kepulauan Maluku penghasil udang bakau.

5. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pembinaan kepada pelaku usaha perikanan khususnya bidang pengolahan dan pemasaran. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pembinaan kepada pelaku usaha perikanan khususnya bidang pengolahan dan pemasaran. Program ini diimplementasikan dengan kegiatan pendataan statistik pelaku usaha perikanan yang ada di Kabupaten Eluor, pembinaan perijinan, FGD pelaku usaha perikanan dan fasilitasi kegiatan kegiatan yang dilaksanakan oleh DDF Provinsi dan KEP. Indikator dari program ini yaitu, persentase pengolahan produk perikanan dengan target sebesar 90% dan bisa tercapai sebesar 88,3%. Target kinerja program ini melebihi dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2024 karena dukungan eluor terhadap bahan baku ikan segar berkualitas tinggi dari hasil tangkapan atau budidaya, memajukan kekineran proses pengolahan dan memenuhi target produksi.

6. Program Penyediaan dan Pengembangan Jasa Perikanan

Program ini memiliki indikator kinerja berupa persentase peningkatan penyediaan bibit ikan. Pada tahun 2024 terjadi peningkatan sebesar 0,28% dari yang ditargetkan terjadi peningkatan sebesar 0,3% yang diperoleh total kelahiran sapi dengan bantuan pada tahun ini (41.107) di bandingkan dengan total kelahiran sapi dengan bantuan pada tahun 2023 (41.067).

7. Program Penyediaan dan Pengembangan Fasilitas Perikanan

Program Penyediaan dan Pengembangan Fasilitas Perikanan. Dengan kegiatan signifikan pada program program perikanan yang layak dan ini merupakan keberhasilan dalam optimalisasi program perikanan. Hal ini tidak terlepas dari dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tidak yang dimanfaatkan untuk rehabilitasi Rumah Petang Hewan (RPH) Kermisense dan Ungga, sehingga semakin banyak prasarana yang layak fungsi diharapkan dapat mendukung pelayanan perikanan yang lebih baik kepada masyarakat.

8. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Program ini bertujuan untuk melindungi kesehatan hewan, manusia, dan lingkungan melalui pengendalian penyakit hewan, peningkatan kesejahteraan hewan, serta pengontrolan produk asal hewan agar aman dikonsumsi. Salah satu capaian program ini adalah jumlah unit usaha peternakan yang tersertifikasi dan persentase penyakit hewan menular yang terungkap sesuai standar untuk unggas. Produk peternakan yang tersertifikasi pada Tahun 2024 terdapat 33 unit usaha dari target 34 unit usaha.



Indikator pencapaian penyakit hewan masalah yang tertangani sesuai waktu tanggap bisa tercapai sebesar 93,1% dari target sebesar 90%. Sesuai waktu tanggap yang dimaksud adalah penanganan penyakit hewan masalah dilakukan secara cepat dan tepat sesuai dengan standar waktu respon yang telah ditetapkan. Fasilitas tersebut didukung dengan peningkatan jumlah penanganan penyakit hewan masalah yang tertangani pada tahun 2024 sebanyak 142 kasus dengan standar sesuai waktu tanggap 126 kasus (88,7%) dan yang tidak sesuai dengan waktu tanggap sebanyak 16 kasus (11,3%) karena adanya keterbatasan petugas dalam menangani keluhan kasus Penyakit Hewan dan Kulit pada akhir tahun. Capaian ini sejalan wujud nyata komitmen Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Elitir dalam menjaga kesehatan hewan serta melindungi masyarakat dari risiko penyakit zoonosis. Keberhasilan ini juga tidak terlepas dari upaya cepat tanggap, koordinasi yang solid, serta dedikasi petugas lapangan dalam melaksanakan penyidikan dan pengendalian penyakit di wilayah Kabupaten Elitir.

2. Program Pengendalian dan Peninggalangan Hewan Perikanan

Tolak ukur kinerja program ini adalah pencapaian pengendalian dan penanggulangan hewan perikanan. Tahun 2024 realisasi kinerja program ini tercapai 100% dari yang ditargetkan sebesar 100%. Realisasi capaian ditinjau dengan pelaksanaan total prosedur penyelesaian dari semua kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian dan penanggulangan hewan perikanan dari yang ditargetkan sebesar 100%.

16. Program Perizinan Usaha Perikanan

Tolak ukur kinerja program ini berupa peningkatan pengajuan perizinan yang pada tahun 2024 tercapai 7% dari target yang ditetapkan yaitu 9% yang ditargetkan. Capaian target ini dengan membandingkan dengan capaian pengajuan rekomendasi RP dan RPP tahun 2023 dengan capaian pengajuan rekomendasi RP dan RPP tahun 2024, melalui Penguasaan Pelaksanaan Iain Usaha Rantau Rebet Hewan, Kelas Hewan, Anabulansi, Prolife Dokter Hewan Manki/Pendukung Mandiri, Tempat Pelayanan Perikanan veteriner, atau Pagar Hewan sebanyak 32 laporan yang merupakan pengurusan terdapat praktik modal veteriner dan perikanan veteriner di Kabupaten Elitir.

11. Program Penyuluhan Perikanan

Indikator program ini adalah pencapaian peningkatan pemutakhiran teranggi Pada tahun 2024 tercapai 9,3% dari 8% yang ditargetkan dan ditargetkan dari perbandingan total pemutakhiran teranggi pada tahun 2024 (172 pemutakhiran) terdiri dari pengembangan kapasitas 143 orang, pelatihan pembudidaya ikan 90 orang dan pelatihan stahon pakan 46 orang dibandingkan pemutakhiran teranggi di tahun 2023 (250 pemutakhiran). Keberhasilan ini merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Elitir dalam meningkatkan kompetensi pemutakhiran, sehingga mampu mendukung produktivitas dan kualitas stahon pemutakhiran di daerah.

Source	Year	Country	Sample Size	Study Design	Outcome	Exposure	Control	Matched	Unmatched	Total	Notes
1	2008	USA	1000	Case-control	Stroke	High	Low	Yes	No	1000	Matched 1:1
2	2009	USA	1000	Case-control	Stroke	High	Low	Yes	No	1000	Matched 1:1
3	2010	USA	1000	Case-control	Stroke	High	Low	Yes	No	1000	Matched 1:1
4	2011	USA	1000	Case-control	Stroke	High	Low	Yes	No	1000	Matched 1:1
5	2012	USA	1000	Case-control	Stroke	High	Low	Yes	No	1000	Matched 1:1
6	2013	USA	1000	Case-control	Stroke	High	Low	Yes	No	1000	Matched 1:1
7	2014	USA	1000	Case-control	Stroke	High	Low	Yes	No	1000	Matched 1:1
8	2015	USA	1000	Case-control	Stroke	High	Low	Yes	No	1000	Matched 1:1
9	2016	USA	1000	Case-control	Stroke	High	Low	Yes	No	1000	Matched 1:1
10	2017	USA	1000	Case-control	Stroke	High	Low	Yes	No	1000	Matched 1:1
11	2018	USA	1000	Case-control	Stroke	High	Low	Yes	No	1000	Matched 1:1
12	2019	USA	1000	Case-control	Stroke	High	Low	Yes	No	1000	Matched 1:1
13	2020	USA	1000	Case-control	Stroke	High	Low	Yes	No	1000	Matched 1:1
14	2021	USA	1000	Case-control	Stroke	High	Low	Yes	No	1000	Matched 1:1
15	2022	USA	1000	Case-control	Stroke	High	Low	Yes	No	1000	Matched 1:1

Sl. No.	Name of the Candidate	Roll No.	Grade	Percentage	Remarks
1	ABHIRAM K	101	B	75	
2	ADARSH K	102	C	60	
3	ADITHYAN K	103	A	85	
4	ADITHYAN K	104	B	70	
5	ADITHYAN K	105	C	55	
6	ADITHYAN K	106	D	40	
7	ADITHYAN K	107	E	25	
8	ADITHYAN K	108	F	10	
9	ADITHYAN K	109	G	5	
10	ADITHYAN K	110	H	0	
11	ADITHYAN K	111	I	0	
12	ADITHYAN K	112	J	0	
13	ADITHYAN K	113	K	0	
14	ADITHYAN K	114	L	0	
15	ADITHYAN K	115	M	0	
16	ADITHYAN K	116	N	0	
17	ADITHYAN K	117	O	0	
18	ADITHYAN K	118	P	0	
19	ADITHYAN K	119	Q	0	
20	ADITHYAN K	120	R	0	
21	ADITHYAN K	121	S	0	
22	ADITHYAN K	122	T	0	
23	ADITHYAN K	123	U	0	
24	ADITHYAN K	124	V	0	
25	ADITHYAN K	125	W	0	
26	ADITHYAN K	126	X	0	
27	ADITHYAN K	127	Y	0	
28	ADITHYAN K	128	Z	0	
29	ADITHYAN K	129	AA	0	
30	ADITHYAN K	130	AB	0	
31	ADITHYAN K	131	AC	0	
32	ADITHYAN K	132	AD	0	
33	ADITHYAN K	133	AE	0	
34	ADITHYAN K	134	AF	0	
35	ADITHYAN K	135	AG	0	
36	ADITHYAN K	136	AH	0	
37	ADITHYAN K	137	AI	0	
38	ADITHYAN K	138	AJ	0	
39	ADITHYAN K	139	AK	0	
40	ADITHYAN K	140	AL	0	
41	ADITHYAN K	141	AM	0	
42	ADITHYAN K	142	AN	0	
43	ADITHYAN K	143	AO	0	
44	ADITHYAN K	144	AP	0	
45	ADITHYAN K	145	AQ	0	
46	ADITHYAN K	146	AR	0	
47	ADITHYAN K	147	AS	0	
48	ADITHYAN K	148	AT	0	
49	ADITHYAN K	149	AU	0	
50	ADITHYAN K	150	AV	0	
51	ADITHYAN K	151	AW	0	
52	ADITHYAN K	152	AX	0	
53	ADITHYAN K	153	AY	0	
54	ADITHYAN K	154	AZ	0	
55	ADITHYAN K	155	BA	0	
56	ADITHYAN K	156	BB	0	
57	ADITHYAN K	157	BC	0	
58	ADITHYAN K	158	BD	0	
59	ADITHYAN K	159	BE	0	
60	ADITHYAN K	160	BF	0	
61	ADITHYAN K	161	BG	0	
62	ADITHYAN K	162	BH	0	
63	ADITHYAN K	163	BI	0	
64	ADITHYAN K	164	BJ	0	
65	ADITHYAN K	165	BK	0	
66	ADITHYAN K	166	BL	0	
67	ADITHYAN K	167	BM	0	
68	ADITHYAN K	168	BN	0	
69	ADITHYAN K	169	BO	0	
70	ADITHYAN K	170	BP	0	
71	ADITHYAN K	171	BQ	0	
72	ADITHYAN K	172	BR	0	
73	ADITHYAN K	173	BS	0	
74	ADITHYAN K	174	BT	0	
75	ADITHYAN K	175	BU	0	
76	ADITHYAN K	176	BV	0	
77	ADITHYAN K	177	BW	0	
78	ADITHYAN K	178	BX	0	
79	ADITHYAN K	179	BY	0	
80	ADITHYAN K	180	BZ	0	
81	ADITHYAN K	181	CA	0	
82	ADITHYAN K	182	CB	0	
83	ADITHYAN K	183	CC	0	
84	ADITHYAN K	184	CD	0	
85	ADITHYAN K	185	CE	0	
86	ADITHYAN K	186	CF	0	
87	ADITHYAN K	187	CG	0	
88	ADITHYAN K	188	CH	0	
89	ADITHYAN K	189	CI	0	
90	ADITHYAN K	190	CJ	0	
91	ADITHYAN K	191	CK	0	
92	ADITHYAN K	192	CL	0	
93	ADITHYAN K	193	CM	0	
94	ADITHYAN K	194	CN	0	
95	ADITHYAN K	195	CO	0	
96	ADITHYAN K	196	CP	0	
97	ADITHYAN K	197	CQ	0	
98	ADITHYAN K	198	CR	0	
99	ADITHYAN K	199	CS	0	
100	ADITHYAN K	200	CT	0	
101	ADITHYAN K	201	CU	0	
102	ADITHYAN K	202	CV	0	
103	ADITHYAN K	203	CW	0	
104	ADITHYAN K	204	CX	0	
105	ADITHYAN K	205	CY	0	
106	ADITHYAN K	206	CZ	0	
107	ADITHYAN K	207	DA	0	
108	ADITHYAN K	208	DB	0	
109	ADITHYAN K	209	DC	0	
110	ADITHYAN K	210	DD	0	
111	ADITHYAN K	211	DE	0	
112	ADITHYAN K	212	DF	0	
113	ADITHYAN K	213	DG	0	
114	ADITHYAN K	214	DH	0	
115	ADITHYAN K	215	DI	0	
116	ADITHYAN K	216	DJ	0	
117	ADITHYAN K	217	DK	0	
118	ADITHYAN K	218	DL	0	
119	ADITHYAN K	219	DM	0	
120	ADITHYAN K	220	DN	0	
121	ADITHYAN K	221	DO	0	
122	ADITHYAN K	222	DP	0	
123	ADITHYAN K	223	DQ	0	
124	ADITHYAN K	224	DR	0	
125	ADITHYAN K	225	DS	0	
126	ADITHYAN K	226	DT	0	
127	ADITHYAN K	227	DU	0	
128	ADITHYAN K	228	DV	0	
129	ADITHYAN K	229	DW	0	
130	ADITHYAN K	230	DX	0	
131	ADITHYAN K	231	DY	0	
132	ADITHYAN K	232	DZ	0	
133	ADITHYAN K	233	EA	0	
134	ADITHYAN K	234	EB	0	
135	ADITHYAN K	235	EC	0	
136	ADITHYAN K	236	ED	0	
137	ADITHYAN K	237	EE	0	
138	ADITHYAN K	238	EF	0	
139	ADITHYAN K	239	EG	0	
140	ADITHYAN K	240	EH	0	
141	ADITHYAN K	241	EI	0	
142	ADITHYAN K	242	EJ	0	
143	ADITHYAN K	243	EK	0	
144	ADITHYAN K	244	EL	0	
145	ADITHYAN K	245	EM	0	
146	ADITHYAN K	246	EN	0	
147	ADITHYAN K	247	EO	0	
148	ADITHYAN K	248	EP	0	
149	ADITHYAN K	249	EQ	0	
150	ADITHYAN K	250	ER	0	
151	ADITHYAN K	251	ES	0	
152	ADITHYAN K	252	ET	0	
153	ADITHYAN K	253	EU	0	
154	ADITHYAN K	254	EV	0	
155	ADITHYAN K	255	EW	0	
156	ADITHYAN K	256	EX	0	
157	ADITHYAN K	257	EY	0	
158	ADITHYAN K	258	EZ	0	
159	ADITHYAN K	259	FA	0	
160	ADITHYAN K	260	FB	0	
161	ADITHYAN K	261	FC	0	
162	ADITHYAN K	262	FD	0	
163	ADITHYAN K	263	FE	0	
164	ADITHYAN K	264	FF	0	
165	ADITHYAN K	265	FG	0	
166	ADITHYAN K	266	FH	0	
167	ADITHYAN K	267	FI	0	
168	ADITHYAN K	268	FJ	0	
169	ADITHYAN K	269	FK	0	
170	ADITHYAN K	270	FL	0	
171	ADITHYAN K	271	FM	0	
172	ADITHYAN K	272	FN	0	
173	ADITHYAN K	273	FO	0	
174	ADITHYAN K	274	FP	0	
175	ADITHYAN K	275	FQ	0	
176	ADITHYAN K	276	FR	0	
177	ADITHYAN K	277	FS	0	
178	ADITHYAN K	278	FT	0	
179	ADITHYAN K	279	FU	0	
180	ADITHYAN K	280	FV	0	
181	ADITHYAN K	281	FW	0	
182	ADITHYAN K	282	FX	0	
183	ADITHYAN K	283	FY	0	
184	ADITHYAN K	284	FZ	0	
185	ADITHYAN K	285	GA	0	
186	ADITHYAN K	286	GB	0	
187	ADITHYAN K	287	GC	0	
188	ADITHYAN K	288	GD	0	
189	ADITHYAN K	289	GE	0	
190	ADITHYAN K	290	GF	0	
191	ADITHYAN K	291	GG	0	
192	ADITHYAN K	292	GH	0	
193	ADITHYAN K	293	GI	0	
194	ADITHYAN K	294	GJ	0	
195	ADITHYAN K	295	GK	0	
196	ADITHYAN K	296	GL	0	
197	ADITHYAN K	297	GM	0	
198	ADITHYAN K	298	GN	0	
199	ADITHYAN K	299	GO	0	
200	ADITHYAN K	300	GP	0	
201	ADITHYAN K	301	GQ	0	
202	ADITHYAN K	302	GR	0	
203	ADITHYAN K	303	GS	0	
204	ADITHYAN K	304	GT	0	
205	ADITHYAN K	305	GU	0	
206	ADITHYAN K	306	GV	0	
207	ADITHYAN K	307	GW	0	
208	ADITHYAN K	308	GX	0	
209	ADITHYAN K	309	GY	0	
210	ADITHYAN K	310	GZ	0	
211	ADITHYAN K	311	HA	0	
212	ADITHYAN K	312	HB	0	
213	ADITHYAN K	313	HC	0	
214	ADITHYAN K	314	HD	0	
215	ADITHYAN K	315	HE	0	
216	ADITHYAN K	316	HF	0	
217	ADITHYAN K	317	HG	0	
218	ADITHYAN K	318	HH	0	
219	ADITHYAN K	319	HI	0	
220	ADITHYAN K	320	HJ	0	
221	ADITHYAN K	321	HK	0	
222	ADITHYAN K	322	HL	0	
223	ADITHYAN K	323	HM	0	
224	ADITHYAN K	324	HN	0	
225	ADITHYAN K	325	HO	0	

1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
6	6	6	6	6
7	7	7	7	7
8	8	8	8	8
9	9	9	9	9
10	10	10	10	10
11	11	11	11	11
12	12	12	12	12
13	13	13	13	13
14	14	14	14	14
15	15	15	15	15
16	16	16	16	16
17	17	17	17	17
18	18	18	18	18
19	19	19	19	19
20	20	20	20	20
21	21	21	21	21
22	22	22	22	22
23	23	23	23	23
24	24	24	24	24
25	25	25	25	25
26	26	26	26	26
27	27	27	27	27
28	28	28	28	28
29	29	29	29	29
30	30	30	30	30
31	31	31	31	31
32	32	32	32	32
33	33	33	33	33
34	34	34	34	34
35	35	35	35	35
36	36	36	36	36
37	37	37	37	37
38	38	38	38	38
39	39	39	39	39
40	40	40	40	40
41	41	41	41	41
42	42	42	42	42
43	43	43	43	43
44	44	44	44	44
45	45	45	45	45
46	46	46	46	46
47	47	47	47	47
48	48	48	48	48
49	49	49	49	49
50	50	50	50	50

Year	1990	1991	1992	1993
1990	100	100	100	100
1991	100	100	100	100
1992	100	100	100	100
1993	100	100	100	100
1994	100	100	100	100
1995	100	100	100	100
1996	100	100	100	100
1997	100	100	100	100
1998	100	100	100	100
1999	100	100	100	100
2000	100	100	100	100
2001	100	100	100	100
2002	100	100	100	100
2003	100	100	100	100
2004	100	100	100	100
2005	100	100	100	100
2006	100	100	100	100
2007	100	100	100	100
2008	100	100	100	100
2009	100	100	100	100
2010	100	100	100	100
2011	100	100	100	100
2012	100	100	100	100
2013	100	100	100	100
2014	100	100	100	100
2015	100	100	100	100
2016	100	100	100	100
2017	100	100	100	100
2018	100	100	100	100
2019	100	100	100	100
2020	100	100	100	100
2021	100	100	100	100
2022	100	100	100	100
2023	100	100	100	100
2024	100	100	100	100
2025	100	100	100	100
2026	100	100	100	100
2027	100	100	100	100
2028	100	100	100	100
2029	100	100	100	100
2030	100	100	100	100

1	2	3	4	5
1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
6	6	6	6	6
7	7	7	7	7
8	8	8	8	8
9	9	9	9	9
10	10	10	10	10
11	11	11	11	11
12	12	12	12	12
13	13	13	13	13
14	14	14	14	14
15	15	15	15	15
16	16	16	16	16
17	17	17	17	17
18	18	18	18	18
19	19	19	19	19
20	20	20	20	20
21	21	21	21	21
22	22	22	22	22
23	23	23	23	23
24	24	24	24	24
25	25	25	25	25
26	26	26	26	26
27	27	27	27	27
28	28	28	28	28
29	29	29	29	29
30	30	30	30	30
31	31	31	31	31
32	32	32	32	32
33	33	33	33	33
34	34	34	34	34
35	35	35	35	35
36	36	36	36	36
37	37	37	37	37
38	38	38	38	38
39	39	39	39	39
40	40	40	40	40
41	41	41	41	41
42	42	42	42	42
43	43	43	43	43
44	44	44	44	44
45	45	45	45	45
46	46	46	46	46
47	47	47	47	47
48	48	48	48	48
49	49	49	49	49
50	50	50	50	50
51	51	51	51	51
52	52	52	52	52
53	53	53	53	53
54	54	54	54	54
55	55	55	55	55
56	56	56	56	56
57	57	57	57	57
58	58	58	58	58
59	59	59	59	59
60	60	60	60	60
61	61	61	61	61
62	62	62	62	62
63	63	63	63	63
64	64	64	64	64
65	65	65	65	65
66	66	66	66	66
67	67	67	67	67
68	68	68	68	68
69	69	69	69	69
70	70	70	70	70
71	71	71	71	71
72	72	72	72	72
73	73	73	73	73
74	74	74	74	74
75	75	75	75	75
76	76	76	76	76
77	77	77	77	77
78	78	78	78	78
79	79	79	79	79
80	80	80	80	80
81	81	81	81	81
82	82	82	82	82
83	83	83	83	83
84	84	84	84	84
85	85	85	85	85
86	86	86	86	86
87	87	87	87	87
88	88	88	88	88
89	89	89	89	89
90	90	90	90	90
91	91	91	91	91
92	92	92	92	92
93	93	93	93	93
94	94	94	94	94
95	95	95	95	95
96	96	96	96	96
97	97	97	97	97
98	98	98	98	98
99	99	99	99	99
100	100	100	100	100

Year	1990	1991	1992	1993	1994	1995
1	1	1	1	1	1	1
2	1	1	1	1	1	1
3	1	1	1	1	1	1
4	1	1	1	1	1	1
5	1	1	1	1	1	1
6	1	1	1	1	1	1
7	1	1	1	1	1	1
8	1	1	1	1	1	1
9	1	1	1	1	1	1
10	1	1	1	1	1	1
11	1	1	1	1	1	1
12	1	1	1	1	1	1
13	1	1	1	1	1	1
14	1	1	1	1	1	1
15	1	1	1	1	1	1
16	1	1	1	1	1	1
17	1	1	1	1	1	1
18	1	1	1	1	1	1
19	1	1	1	1	1	1
20	1	1	1	1	1	1
21	1	1	1	1	1	1
22	1	1	1	1	1	1
23	1	1	1	1	1	1
24	1	1	1	1	1	1
25	1	1	1	1	1	1
26	1	1	1	1	1	1
27	1	1	1	1	1	1
28	1	1	1	1	1	1
29	1	1	1	1	1	1
30	1	1	1	1	1	1
31	1	1	1	1	1	1
32	1	1	1	1	1	1
33	1	1	1	1	1	1
34	1	1	1	1	1	1
35	1	1	1	1	1	1
36	1	1	1	1	1	1
37	1	1	1	1	1	1
38	1	1	1	1	1	1
39	1	1	1	1	1	1
40	1	1	1	1	1	1
41	1	1	1	1	1	1
42	1	1	1	1	1	1
43	1	1	1	1	1	1
44	1	1	1	1	1	1
45	1	1	1	1	1	1
46	1	1	1	1	1	1
47	1	1	1	1	1	1
48	1	1	1	1	1	1
49	1	1	1	1	1	1
50	1	1	1	1	1	1

QUESTION

QUESTION	ANSWER	MARKS	STATUS	DATE	TIME	USER
1. The following are the components of a business plan except:	Executive Summary	1	Correct	2023-10-27	10:30	John Doe
2. A business plan is a document that:	outlines the business's goals and strategies	1	Correct	2023-10-27	10:35	Jane Smith
3. The primary purpose of a business plan is to:	attract investors and secure financing	1	Correct	2023-10-27	10:40	Mike Johnson
4. A business plan should be updated:	regularly, at least once a year	1	Correct	2023-10-27	10:45	Sarah Lee
5. The executive summary is the most important part of a business plan because:	it provides a concise overview of the entire plan	1	Correct	2023-10-27	10:50	David Kim
6. A business plan should include a market analysis to:	understand the industry and target market	1	Correct	2023-10-27	10:55	Emily White
7. The financial section of a business plan should include:	income statements, balance sheets, and cash flow statements	1	Correct	2023-10-27	11:00	Chris Brown
8. A business plan is essential for:	all businesses, regardless of size	1	Correct	2023-10-27	11:05	Alex Green
9. The marketing plan section of a business plan should outline:	the strategies for reaching and selling to the target market	1	Correct	2023-10-27	11:10	Mia Black
10. A business plan should be written in a clear and concise manner to:	communicate the business's vision and goals effectively	1	Correct	2023-10-27	11:15	Noah Gray

Date	Particulars	Debit	Credit
	By Balance		1000
	To Cash	500	
	To Bank	300	
	To Debtors	200	
	To Creditors		100
	To Profit		100
	To Loss		50
	To Balance		1000
	Total	1000	1000

Source	Year	Country	Sample Size	Study Design	Outcome	Exposure	Control	Matched	Unmatched	Total
1	2008	USA	1000	Case-control	Stroke	High	Low	Yes	No	1000
2	2008	USA	1000	Case-control	Stroke	High	Low	Yes	No	1000
3	2008	USA	1000	Case-control	Stroke	High	Low	Yes	No	1000
4	2008	USA	1000	Case-control	Stroke	High	Low	Yes	No	1000
5	2008	USA	1000	Case-control	Stroke	High	Low	Yes	No	1000
6	2008	USA	1000	Case-control	Stroke	High	Low	Yes	No	1000
7	2008	USA	1000	Case-control	Stroke	High	Low	Yes	No	1000
8	2008	USA	1000	Case-control	Stroke	High	Low	Yes	No	1000
9	2008	USA	1000	Case-control	Stroke	High	Low	Yes	No	1000
10	2008	USA	1000	Case-control	Stroke	High	Low	Yes	No	1000
11	2008	USA	1000	Case-control	Stroke	High	Low	Yes	No	1000
12	2008	USA	1000	Case-control	Stroke	High	Low	Yes	No	1000
13	2008	USA	1000	Case-control	Stroke	High	Low	Yes	No	1000
14	2008	USA	1000	Case-control	Stroke	High	Low	Yes	No	1000
15	2008	USA	1000	Case-control	Stroke	High	Low	Yes	No	1000
16	2008	USA	1000	Case-control	Stroke	High	Low	Yes	No	1000
17	2008	USA	1000	Case-control	Stroke	High	Low	Yes	No	1000
18	2008	USA	1000	Case-control	Stroke	High	Low	Yes	No	1000
19	2008	USA	1000	Case-control	Stroke	High	Low	Yes	No	1000
20	2008	USA	1000	Case-control	Stroke	High	Low	Yes	No	1000
21	2008	USA	1000	Case-control	Stroke	High	Low	Yes	No	1000
22	2008	USA	1000	Case-control	Stroke	High	Low	Yes	No	1000
23	2008	USA	1000	Case-control	Stroke	High	Low	Yes	No	1000
24	2008	USA	1000	Case-control	Stroke	High	Low	Yes	No	1000
25	2008	USA	1000	Case-control	Stroke	High	Low	Yes	No	1000
26	2008	USA	1000	Case-control	Stroke	High	Low	Yes	No	1000
27	2008	USA	1000	Case-control	Stroke	High	Low	Yes	No	1000
28	2008	USA	1000	Case-control	Stroke	High	Low	Yes	No	1000
29	2008	USA	1000	Case-control	Stroke	High	Low	Yes	No	1000
30	2008	USA	1000	Case-control	Stroke	High	Low	Yes	No	1000
31	2008	USA	1000	Case-control	Stroke	High	Low	Yes	No	1000
32	2008	USA	1000	Case-control	Stroke	High	Low	Yes	No	1000
33	2008	USA	1000	Case-control	Stroke	High	Low	Yes	No	1000
34	2008	USA	1000	Case-control	Stroke	High	Low	Yes	No	1000
35	2008	USA	1000	Case-control	Stroke	High	Low	Yes	No	1000
36	2008	USA	1000	Case-control	Stroke	High	Low	Yes	No	1000
37	2008	USA	1000	Case-control	Stroke	High	Low	Yes	No	1000
38	2008	USA	1000	Case-control	Stroke	High	Low	Yes	No	1000
39	2008	USA	1000	Case-control	Stroke	High	Low	Yes	No	1000
40	2008	USA	1000	Case-control	Stroke	High	Low	Yes	No	1000
41	2008	USA	1000	Case-control	Stroke	High	Low	Yes	No	1000
42	2008	USA	1000	Case-control	Stroke	High	Low	Yes	No	1000
43	2008	USA	1000	Case-control	Stroke	High	Low	Yes	No	1000
44	2008	USA	1000	Case-control	Stroke	High	Low	Yes	No	1000
45	2008	USA	1000	Case-control	Stroke	High	Low	Yes	No	1000
46	2008	USA	1000	Case-control	Stroke	High	Low	Yes	No	1000
47	2008	USA	1000	Case-control	Stroke	High	Low	Yes	No	1000
48	2008	USA	1000	Case-control	Stroke	High	Low	Yes	No	1000
49	2008	USA	1000	Case-control	Stroke	High	Low	Yes	No	1000
50	2008	USA	1000	Case-control	Stroke	High	Low	Yes	No	1000

1. The following data were obtained from a study of the effect of temperature on the rate of reaction between hydrogen peroxide and potassium iodide:

2. The rate of reaction was measured by the volume of oxygen gas evolved in a fixed time.

3. The following table shows the results of the experiment. The volume of oxygen gas evolved is given in cm³.

Table 1
Temperature Effect on the Rate of Reaction between Hydrogen Peroxide and Potassium Iodide

Temperature / °C	Volume of oxygen gas evolved / cm ³	Rate of reaction / cm ³ s ⁻¹
10	10	0.10
20	20	0.20
30	40	0.40
40	80	0.80
50	160	1.60

Table 1

Year	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Q1	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3.0	3.3	3.6	3.9	4.2
Q2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3.0	3.3	3.6	3.9	4.2	4.5
Q3	1.8	2.1	2.4	2.7	3.0	3.3	3.6	3.9	4.2	4.5	4.8
Q4	2.1	2.4	2.7	3.0	3.3	3.6	3.9	4.2	4.5	4.8	5.1
Annual	1.6	1.9	2.2	2.5	2.8	3.1	3.4	3.7	4.0	4.3	4.6

Table 1 shows the quarterly and annual data for the period 2010-2020. The data is presented in a grid format with columns for each year and rows for each quarter and an annual summary row. The values generally increase over time, with a notable jump in 2020.

Year	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
1990											
1991											
1992											
1993											
1994											
1995											
1996											
1997											
1998											
1999											
2000											

Berdasarkan tabel Analisis pelayanan pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo, analisa capaian indikator diuraikan sebagai berikut:

1. Nilai dan Predikat SAKIP Perangkat Daerah

Pada tahun 2021, nilai SAKIP Dinas Peternakan dan Perikanan berada pada tahap awal pengujian akuntabilitas kinerja. Tahun 2022, terjadi peningkatan signifikan yang menunjukkan adanya perbaikan pada aspek perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program. Namun pada tahun 2023, nilai SAKIP mengalami penurunan meskipun tetap di predikat A, sedangkan pada tahun 2024 nilai SAKIP kembali turun dan predikat juga ikut turun dari nilai A menjadi BB. Penurunan kinerja ini lebih banyak disebabkan adanya penyimpangan standar penilaian oleh APF (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah).



Gambar 1. Capaian Nilai SAKIP Dinas Peternakan dan Perikanan

2. Peningkatan produksi perikanan dalam penyediaan sumber meningkatnya produksi hasil perikanan diukur tingkat keberhasilannya dengan jumlah indikator sebanyak 1 (satu) indikator yaitu persentase peningkatan produksi perikanan. Proses peningkatan produksi perikanan merupakan dasar atau indikator yang digunakan untuk menghitung seberapa besar pertumbuhan atau kenaikan hasil produksi perikanan dalam suatu periode tertentu. Biasanya dibandingkan antara satu tahun dengan tahun sebelumnya. Nilai ini dinyatakan dalam bentuk persentase (%) dan mencerminkan efektivitas program atau kegiatan yang dilakukan dalam mendukung sektor perikanan. Indikator persentase peningkatan produksi perikanan dapat dirincikan sebagai berikut dengan target 8,1% dan realisasi 5,77%. Pada tahun 2024 persentase peningkatan produksi perikanan yang diragukan meningkat sebanyak 8,1% pada realisasinya mengalami penurunan sebesar 5,77%. Penurunan ini terjadi akibat menurunnya produksi perikanan tangkap laut dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan persentase peningkatan produksi perikanan didasarkan pada gabungan antara peningkatan produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Meskipun produksi perikanan budidaya pada tahun ini menunjukkan

peringkatan dibandingkan tahun lalu, penerapan signifikan pada produksi perikanan tangkap menyebabkan secara keseluruhan capaian produksi perikanan mengalami penurunan, penerapan tangkap Maksimum yang lebih panjang dari biasanya cenderung menimbulkan insidial laut yang lebih stabil, terutama dari segi ombak dan arus laut. Cuaca yang tenang dan gelombang yang tenang membuat aktivitas penangkapan ikan menjadi lebih mudah dan aman, sehingga nelayan dapat melaut lebih sering dan menangkap lebih banyak ikan.

3. **Persentase Peningkatan Produktivitas Ternak** Indikator persentase peningkatan produktivitas ternak dapat diraih sebesar +111,5% dengan target 6,3% dan terrealisasi 6,34%. Indikator Persentase wilayah yang terkontrol dari penyakit hewan melalui strategi (PHMS) dapat diraih sebesar 102,7% dengan target 91% dan terrealisasi 92,3%, sedangkan indikator persentase produk peternakan yang layak edar dapat terrealisasi sebesar 100,9% dengan target 97% dan terrealisasi sebesar 97,0%. Realisasi kinerja tahun 2024 pada urusan meningkatnya produktivitas dan kualitas produk peternakan. (Se diarahkan dari capaian tahun 2022 sampai dengan tahun 2024, tingkat capaian indikator peningkatan produktivitas ternak di tahun 2024 mengalami peningkatan bertahap yang signifikan. Hal ini disebabkan pada tahun 2022 sampai dengan 2023 terdapat kasus Penyakit Kaku dan Malut (PMK) yang mengganggu produktivitas ternak seperti ayam sapi gajah yang tidak dapat bereproduksi saat ternak tergejala Penyakit Hutan dan Kaku (PHK). Sedangkan di tahun 2024 kasus Penyakit Hutan dan Kaku (PHK) sudah dapat terkontrol sehingga produktivitas ternak menunjukkan peningkatan, meskipun pada akhir tahun 2024 pada bulan Desember di Kabupaten Bitung mulai merambak kembali Penyakit Malut dan Kaku (PMK).
4. **Persentase Produk Peternakan Layak Edar**: Indikator persentase produk peternakan yang layak edar menunjukkan capaian yang sangat baik. Dari target sebesar 97%, Kabupaten Bitung berhasil merealisasikan 97,9%. Persentase ini merupakan hasil perbandingan antara produk peternakan yang layak edar dengan total jumlah produk yang dihasilkan. Adapun untuk produk yang tidak layak edar, seperti daging ayam yang positif terkontaminasi salmonella. Dinas Peternakan dan Perikanan melakukan langkah pembinaan kepada petaka usaha, khususnya terkait an sanitasi dan hygiene. Hal ini merupakan bagian dari upaya kita dalam menjaga keamanan pangan sekaligus melindungi kesehatan masyarakat Kabupaten Bitung.
5. **Persentase wilayah yang terkontrol dari penyakit hewan melalui strategi (PHMS)** Pada tahun 2024 Dinas Peternakan dan Perikanan berhasil mencapai realisasi indikator pengendalian Penyakit

Kewon Monular Strategis (RMS) sebesar 91,34, melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 91%. Capaian ini menunjukkan komitmen dan kerja keras seluruh pihak, terutama SDM kita yang mengupayakan dalam upaya pencegahan, pengendalian, dan penanganan Penyakit Hewan Monular Strategis (PHMS) di Kabupaten Bantaeng. Dari total 245 desa dan kelurahan, sebanyak 129 wilayah bebas bebas atau terbebas dengan kematian 0%, meskipun masih terdapat 19 wilayah terdampak dengan kasus kematian. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 persentase wilayah yang terbebas penyakit hewan monular strategis mengalami peningkatan dikarenakan pada tahun 2022 tidak hanya Penyakit Maut dan Taku yang menyerang ternak dan unggas terdapat penyakit Lumpy Skin Disease (LSD).

2.3.1a - Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Dalam penyusunan Rencana Kerja (Rencana Kerja) Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bantaeng Tahun 2026, terlebih dahulu dilakukan inventarisasi dan penetapan siklus prioritas permasalahan/pemmasalahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng yang dirumuskan menjadi permasalahan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Perikanan.

Berikut ini isu-isu penting yang perlu mendapat perhatian, sebagai berikut:

Masalah Potensial	Masalah	Akar Masalah
Produksi perikanan tangkap belum stabil dan cenderung fluktuatif	Fluktuasi produksi perikanan tangkap akibat perubahan cuaca ekstrem	Merusaknya ketersediaan ikan di Perairan Umum Daerah karena adanya banjir setiap tahun dan kapal fishing
	Belum optimalnya pemberdayaan nelayan hasil akibat tanggap pemberdayaan yang berorientasi serta keterbatasan dalam penyediaan sarana dan prasarana pendukung usaha perikanan tangkap	Kondisinya kualitas sumber daya manusia, baik dari segi pengetahuan teoritis maupun keterampilan dalam penerapan teknik-teknik produksi terutama dalam penyelenggaraan produksi garam
		Pencapaian hasil olahan garam masih kalah dengan hasil produksi garam dari pantai utara
		Masih banyaknya limbah organik di sungai dengan tidak terurus, sehingga memerlukan pemeliharaan internal
		Belum adanya kontrol/jawa terhadap nelayan

		Terbatasnya kualitas akses permodalan bagi nelayan
	Ketang membatasi infrastruktur perangkapan laut	Keterbatasan fasilitas pelabuhan, khususnya area labrak yang sudah rusak dan tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah armada, sehingga menghambat kelancaran operasional dan pelayanan pelabuhan
Belum optimalnya produksi perikanan budidaya	Belum optimalnya produksi perikanan konvensional, produksi tambak yang mengalami stagnasi	Masih banyaknya pembudidaya yang belum mengadopsi atau mengadopsi teknologi budidaya dengan baik dan modern yang mengadopsi cara budidaya tradisional dengan teknik turun temurun
		Pemurunan kualitas induk ikan dan kualitas air lautnya pemangaj dan tingkat infeksi akses budidaya ikan
		Adanya penurunan kualitas teknologi budidaya ikan
		Pemurunan daya saing perikanan budidaya karena menurunnya masih di pasar tradisional
		Terbatasnya kualitas akses permodalan bagi pembudidaya ikan
	Elastisitas produksi tidak dapat mengimbangi harga jual ikan	Tingginya ketergantungan pada harga bahan baku input untuk pakan
	Produksi perikanan non konvensional masih rendah yang mengalami penurunan	Fermentasi pasar terbatas ikan ikan mengadopsi teknologi pemurnan sehingga pembudidaya menggunakan produksi ikan hasil kualitas harga ikan di pasar
Rendahnya pengawaran gelula usaha kelautan dan perikanan	Masih rendahnya perilaku usaha perikanan yang patuh	Masih terdapat fishing yang diabaikan sich iznahnya pengawaran, di mana beberapa pemerintah kabupaten terbatas karena pada sosialisasi, sehingga pemerintah menjadi pemangaj pemerintah provinsi yang belum optimal dilaksanakan
		Masih terdapatnya kesadaran gelula usaha perikanan terhadap pentingnya liputan usaha
		Kelompok nelayan yang terdampar tidak terikutnya secara standar produksi perikanan

		Kondisinya pembudidayaan yang memiliki izin
Belum optimalnya pengalihan dan pemenuhan hasil produksi	Produk olahan hasil produksi masih rendah, pasar belum terjangkau wilayah luas	Adanya promosi dan pemasaran masih terbatas di pasar lokal
		Kurang ramahnya produk olahan produksi yang menjadi daya tarik pembeli
		Masih terbanyak kesulitan pengurusan izin produksi untuk pengalihan hasil
Belum optimalnya produksi komoditas perikanan	Kapasitas produksi agung untuk pakan ternak	Fasilitas agung dalam daerah belum memadai, kebutuhan pakan di Kabupaten Blitar
	Ketersediaan pakan yang masih banyak tergantung pembelian sehingga pakan masih mahal	Tingginya ketergantungan pada bahan baku impor untuk pakan ternak
	Fluktuasi harga produk peternakan (daging, daging)	Kontak pemasaran olahan pasar yang mengakibatkan peternak kecil kesulitan untuk bersaing dengan peternak besar dalam hal kualitas harga dan volume produksi
		Perluanya peningkatan kapasitas produksi hasil olahan dalam meningkatkan kompetensi lebih lanjut
		Perluanya pengalihan sarana dan prasarana laboratorium pakan ternak
Terbatasnya pemenuhan kebutuhan pakan ternak yang layak harga.	Belum optimalnya produksi peternakan karena minimnya penyediaan dan program kembang pemenuhan peternakan	Perluanya optimalisasi Rumah Pemastakan Hewan baik RPH dan RPU agar dapat mengkomodifikasi seluruh kawasan di Kabupaten Blitar
		Perluanya optimalisasi operasional Pasar Hewan Terpadu
		Minimnya Perekam Kesehatan Hewan (Pukchewan) di Kabupaten Blitar sehingga tidak dapat menunjang seluruh populasi ternak di Kabupaten Blitar
Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner belum optimal	Masih minimnya Perekam Hewan Hewan Strategi (PHHS) yang menjadi tantangan tersendiri dalam upaya preventif rasagunakarsifika	Dimas survellans dan kontrol dini penyakit hewan bisa lebih efektif



		Kondisinya kemudahan dan kesiapan pemerintah dalam melakukan kerja jarak jauh
	Belum optimalnya persiapan prasyarat teknis dalam hal tenaga kerja dan produksi bahan	Masih adanya masalah tenaga dan produk bahan yang dibutuhkan
	Belum optimalnya akses masyarakat terhadap pelayanan jasa medis veteriner (pemeriksaan, diagnosis, dan pengobatan hewan).	Kemungkinan adanya masalah tenaga medis dan permasalahan veteriner dengan populasi ternak yang ada di Kabupaten Cilacap
		Perlu nya alat dan Laboratorium kesehatan hewan dan laboratorium veteriner
	Terdapat pasar atau intermediari ternak yang sehat serta bahan pangan asal hewan yang aman	Kondisinya kemudahan akses usaha terhadap pentingnya produksi bahan dan produk bahan yang sehat
		Belum optimalnya pembinaan / sertifikasi HAKI
	Masih terbatasnya pembinaan dan pendampingan dalam aspek teknis terkait penerapan standar kesjahteraan hewan.	Keterbatasan jumlah dan kapasitas tenaga
Masih besarnya peran & belum optimalnya keberagaman usaha yang mendapat dampak pengalihan usaha ternak	Pembinaan sub sektor peternakan belum optimal	Miliknya produk peternakan belum berkembang
		Perlu nya alat dan produk peternakan
	Pengelolaan limbah peternakan belum optimal sehingga mencemari lingkungan	Perlu nya pengelolaan limbah sektor peternakan
Belum optimalnya nilai SOP Pranglist Daerah	Belum optimalnya pengawasan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten, Kota yang sesuai ketentuan	Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana peternakan urusan pemerintah daerah
		Kemudahan akses internet informasi penggunaan
		Pengawasan dokumen peternakan, evaluasi dan pelayanan hanya berfokus formalitas tanpa analisa mendalam

		Arif mengupayakan inovasi dalam kualitas fasilitas pengimpor atau rancangan arif sesuai dengan standar internasional
		Ekspor antara lainya arif pergi dalam pengalangan arif

Bantuan karutana yang dihadapi dalam sektor pertanian dan peternakan memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah. Ketidaksiapan mengatasi bantuan/tambahan ini akan menghambat efektivitas program prioritas daerah dan menurunkan daya saing sektor unggulan daerah. Karena pelaku utama seperti nelayan dan peternak tidak mendapatkan dukungan yang memadai baik dari sisi infrastruktur, teknologi, pemukiman, maupun akses pasar. Kondisi produktivitas tidak hanya berdampak pada penurunan pendapatan masyarakat, tetapi juga menghambat pertumbuhan industri pengolahan hasil pertanian dan peternakan, yang seharusnya menjadi pendorong utama dalam menciptakan nilai tambah dan lapangan kerja baru.

Selain itu, adanya fluktuasi harga ketegangan pada bahan baku impor, serta lemahnya hilirisasi menyebabkan produktivitas tidak berkelanjutan. Hal ini akan mengurangi kontribusi sektor pertanian dan peternakan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan. Tanpa peningkatan produktivitas yang signifikan, akan sulit mencapai target pertumbuhan daerah.

Adanya prising atau potensi dan formula ini itu penting yang ada pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo dalam pelaksanaan tugas pokok adalah sebagai berikut

Fungsi Utama yang Meliputi Monev di PD	Fungsi Utama di PD	Isi UMR yang relevan dengan PD	Isi Monev Monev yang relevan dengan PD			Isi Monev di PD
			Global	Regional	Operasional	
Fungsi utama meliputi: <ul style="list-style-type: none"> 1. Fungsi pelayanan 2. Fungsi pengendalian 3. Fungsi pengawasan 4. Fungsi koordinasi 5. Fungsi komunikasi 6. Fungsi administrasi 7. Fungsi keuangan 8. Fungsi hukum 9. Fungsi hubungan masyarakat 10. Fungsi lain-lain 	Fungsi utama meliputi: <ul style="list-style-type: none"> 1. Fungsi pelayanan 2. Fungsi pengendalian 3. Fungsi pengawasan 4. Fungsi koordinasi 5. Fungsi komunikasi 6. Fungsi administrasi 7. Fungsi keuangan 8. Fungsi hukum 9. Fungsi hubungan masyarakat 10. Fungsi lain-lain 	Isi UMR yang relevan dengan PD meliputi: <ul style="list-style-type: none"> 1. Fungsi pelayanan 2. Fungsi pengendalian 3. Fungsi pengawasan 4. Fungsi koordinasi 5. Fungsi komunikasi 6. Fungsi administrasi 7. Fungsi keuangan 8. Fungsi hukum 9. Fungsi hubungan masyarakat 10. Fungsi lain-lain 	Monev Global meliputi: <ul style="list-style-type: none"> 1. Fungsi pelayanan 2. Fungsi pengendalian 3. Fungsi pengawasan 4. Fungsi koordinasi 5. Fungsi komunikasi 6. Fungsi administrasi 7. Fungsi keuangan 8. Fungsi hukum 9. Fungsi hubungan masyarakat 10. Fungsi lain-lain 	Monev Regional meliputi: <ul style="list-style-type: none"> 1. Fungsi pelayanan 2. Fungsi pengendalian 3. Fungsi pengawasan 4. Fungsi koordinasi 5. Fungsi komunikasi 6. Fungsi administrasi 7. Fungsi keuangan 8. Fungsi hukum 9. Fungsi hubungan masyarakat 10. Fungsi lain-lain 	Monev Operasional meliputi: <ul style="list-style-type: none"> 1. Fungsi pelayanan 2. Fungsi pengendalian 3. Fungsi pengawasan 4. Fungsi koordinasi 5. Fungsi komunikasi 6. Fungsi administrasi 7. Fungsi keuangan 8. Fungsi hukum 9. Fungsi hubungan masyarakat 10. Fungsi lain-lain 	Isi Monev di PD meliputi: <ul style="list-style-type: none"> 1. Fungsi pelayanan 2. Fungsi pengendalian 3. Fungsi pengawasan 4. Fungsi koordinasi 5. Fungsi komunikasi 6. Fungsi administrasi 7. Fungsi keuangan 8. Fungsi hukum 9. Fungsi hubungan masyarakat 10. Fungsi lain-lain

<p>Penelitian tindakan kelas (PTK) sebagai strategi belajar mengajar yang inovatif dan kreatif untuk meningkatkan mutu pembelajaran di kelas.</p>	<p>Menjadi acuan yang dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan PTK di kelas.</p>	<p>Tujuan penelitian yang diuraikan secara jelas, lugas, dan terukur.</p>	<p>Penelitian tindakan kelas sebagai strategi belajar mengajar yang inovatif dan kreatif untuk meningkatkan mutu pembelajaran di kelas.</p>	<p>Menjadi acuan yang dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan PTK di kelas.</p>	<p>Penelitian tindakan kelas sebagai strategi belajar mengajar yang inovatif dan kreatif untuk meningkatkan mutu pembelajaran di kelas.</p>	
<p>Penelitian tindakan kelas (PTK) sebagai strategi belajar mengajar yang inovatif dan kreatif untuk meningkatkan mutu pembelajaran di kelas.</p>	<p>Menjadi acuan yang dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan PTK di kelas.</p>	<p>Tujuan penelitian yang diuraikan secara jelas, lugas, dan terukur.</p>	<p>Penelitian tindakan kelas sebagai strategi belajar mengajar yang inovatif dan kreatif untuk meningkatkan mutu pembelajaran di kelas.</p>	<p>Menjadi acuan yang dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan PTK di kelas.</p>	<p>Penelitian tindakan kelas sebagai strategi belajar mengajar yang inovatif dan kreatif untuk meningkatkan mutu pembelajaran di kelas.</p>	
<p>Penelitian tindakan kelas (PTK) sebagai strategi belajar mengajar yang inovatif dan kreatif untuk meningkatkan mutu pembelajaran di kelas.</p>	<p>Menjadi acuan yang dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan PTK di kelas.</p>	<p>Tujuan penelitian yang diuraikan secara jelas, lugas, dan terukur.</p>	<p>Penelitian tindakan kelas sebagai strategi belajar mengajar yang inovatif dan kreatif untuk meningkatkan mutu pembelajaran di kelas.</p>	<p>Menjadi acuan yang dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan PTK di kelas.</p>	<p>Penelitian tindakan kelas sebagai strategi belajar mengajar yang inovatif dan kreatif untuk meningkatkan mutu pembelajaran di kelas.</p>	<p>Menjadi acuan yang dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan PTK di kelas.</p>
<p>Penelitian tindakan kelas (PTK) sebagai strategi belajar mengajar yang inovatif dan kreatif untuk meningkatkan mutu pembelajaran di kelas.</p>	<p>Menjadi acuan yang dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan PTK di kelas.</p>	<p>Tujuan penelitian yang diuraikan secara jelas, lugas, dan terukur.</p>	<p>Penelitian tindakan kelas sebagai strategi belajar mengajar yang inovatif dan kreatif untuk meningkatkan mutu pembelajaran di kelas.</p>	<p>Menjadi acuan yang dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan PTK di kelas.</p>	<p>Penelitian tindakan kelas sebagai strategi belajar mengajar yang inovatif dan kreatif untuk meningkatkan mutu pembelajaran di kelas.</p>	<p>Menjadi acuan yang dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan PTK di kelas.</p>



Kebijakan dalam rangka pemenuhan kewajiban lingkungan dan sosial tahun 2024	Kebijakan dalam rangka pemenuhan kewajiban lingkungan dan sosial tahun 2024	Kebijakan dalam rangka pemenuhan kewajiban lingkungan dan sosial tahun 2024	Kebijakan dalam rangka pemenuhan kewajiban lingkungan dan sosial tahun 2024	Kebijakan dalam rangka pemenuhan kewajiban lingkungan dan sosial tahun 2024	Kebijakan dalam rangka pemenuhan kewajiban lingkungan dan sosial tahun 2024	Kebijakan dalam rangka pemenuhan kewajiban lingkungan dan sosial tahun 2024
Kebijakan dalam rangka pemenuhan kewajiban lingkungan dan sosial tahun 2024	Kebijakan dalam rangka pemenuhan kewajiban lingkungan dan sosial tahun 2024	Kebijakan dalam rangka pemenuhan kewajiban lingkungan dan sosial tahun 2024	Kebijakan dalam rangka pemenuhan kewajiban lingkungan dan sosial tahun 2024	Kebijakan dalam rangka pemenuhan kewajiban lingkungan dan sosial tahun 2024	Kebijakan dalam rangka pemenuhan kewajiban lingkungan dan sosial tahun 2024	Kebijakan dalam rangka pemenuhan kewajiban lingkungan dan sosial tahun 2024

Terdapat beberapa strategi serta arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi perusahaan tersebut. Dinas Perikanan dan Perikanan melaksanakan program-program yang terarah, terukur, dan berkesinambungan dengan fokus pada peningkatan produksi perikanan, dan pemertanian, pengendalian terhadap Penyakit Ikan dan Hama Ikan (PHI), serta peningkatan produk pertanian yang layak pasar sebagai berikut:

Strategi 1: Peningkatan produksi perikanan tangkap	
Arah Kebijakan	Program
Peningkatan nelayan kecil melalui penguatan kapasitas nelayan, diversifikasi usaha, penguatan kelembagaan, penyediaan sarana permodalan, penyediaan sarana usaha guna meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan nelayan. Penguatan infrastruktur pendukung seperti pelatihan, layanan, tempat pelabuhan ikan.	Program Penguatan Perikanan Tangkap

Strategi 2 Peningkatan produktivitas perikanan budidaya baik konvensional dan non konvensional	
Arah Kebijakan	Program
Pemberdayaan pembudidaya ikan kecil melalui peningkatan kapasitas SDM, pengalihan, penggantian kolam/bakau, dan peningkatan akses permodalan usaha	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
Facilitas permodalan kesehatan, dan sarana produksi serta optimalisasi Mutu Pembenihan Ikan	
Optimalisasi pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya melalui pencegahan, pengendalian, serta pengawasan penyakit ikan serta monitoring kualitas air dan lingkungan perairan budidaya	

Strategi 3 Peningkatan kredibilitas dan kepatuhan pelaku usaha perikanan	
Arah Kebijakan	Program
Pelaksanaan sosialisasi, penyuluhan, dan pendampingan regulasi kepada pelaku usaha perikanan untuk kepatuhan terhadap standar yang berlaku dan penerapan usaha yang berkelanjutan	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan

Strategi 4 Meningkatkan kualitas pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	
Arah Kebijakan	Program
Facilitas pelatihan teknis pengolahan hasil perikanan, penerapan standar mutu dan keamanan pangan, serta pendampingan usaha hasil sampingan (SHS) nelayan perikanan	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
Peningkatan infrastruktur dan sarana pendukung pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	
Pengkatan pemasaran hasil perikanan melalui digitalisasi dan promosi	



Strategi 4	
Meningkatkan kualitas pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	
Arah Kebijakan	Program
<p>Fasilitas pelatihan teknis pengolahan hasil perikanan, penerapan standar mutu dan keamanan pangan, serta pendampingan usaha kecil menengah (UKM) sektor perikanan</p> <p>Peningkatan infrastruktur dan sarana pendukung pengolahan dan pemasaran hasil perikanan</p> <p>Pengantar pemasaran hasil perikanan melalui digitalisasi dan promosi</p>	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan

Strategi 3	
Peningkatan kualitas mutu bibit, obat dan pakan ternak	
Arah Kebijakan	Program
<p>Fasilitas penyediaan bibit unggul, pakan berkualitas, dan obat ternak untuk meningkatkan produktivitas ternak</p> <p>Peningkatan ketersediaan bahan baku pakan ternak dan peningkatan produksi pakan mandiri (self mixing)</p>	Program Penyediaan Dan Pengembangan Ternak Pertanian

Strategi 5	
Peningkatan pelayanan pemerintah dalam mendukung produktivitas dan kesehatan peternak sapi potong	
Arah Kebijakan	Program
<p>Peningkatan kualitas dan layanan pelayanan pemerintah seperti Rumah Potong Hewan (RPH), Pasar Hewan, Puskesmas, Laboratorium Kesehatan Hewan dan Veteriner untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan, layanan kesehatan dan keamanan pangan sapi potong, serta mendukung peningkatan produktivitas</p>	Program Penyediaan Dan Pengembangan Pelayanan Pertanian

Strategi 7:
Meningkatkan status kesehatan hewan dan kualitas produknya

Arah Kebijakan	Program
Pemajinan tingkat atas hewan melalui penguatan surveillance, tindakan pencegahan, pengujian per laboratorium kesehatan hewan serta penyediaan layanan medis veteriner yang tepat dan tepat	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
Penerapan standar sanitasi dan keamanan pangan (sertifikasi HACCP) pada produk peternakan	

Strategi 8:
Tercapainya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian

Arah Kebijakan	Program
Kemampuan negara terhadap bencana alam maupun wabah penyakit hewan untuk meminimalisir kerugian peternak	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Strategi 9:
Meningkatkan kapasitas usaha pelaku sektor peternakan

Arah Kebijakan	Program
Pengawasan berisiko terhadap Klinik Hewan, Penyakit Dalam Hewan, dan tenaga kesehatan hewan untuk memastikan kapasitas	Program Pertanian Usaha Pertanian

Strategi 10:
Meningkatkan pendampingan usaha sektor peternakan

Arah Kebijakan	Program
Pengembangan unit usaha Nilitasi produk peternakan (olahan daging, susu, telur)	Program Penyaluran Pertanian
Pengawasan kelembagaan kelompok peternak dan akses pembiayaan (RUK, lembaga peternakan)	
Pengembangan teknologi pengolahan limbah peternakan menjadi produk bernilai tambah	

Penjabaran program terhadap pencapaian visi misi Kepala Daerah Kabupaten Bitter dapat dijabarkan pada pokok kinerja Tiga Formulasi dan Pelaksanaan Kebijakan Eliter sebagai berikut:



2.4. Kritis terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), terdapat beberapa tahapan penting yang perlu diperhatikan, mulai dari perancangan awal hingga tahap penyusunan akhir yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pada tahap rancangan awal RKPD, umumnya disusun berdasarkan aspirasi masyarakat, arahan dari pemerintah daerah, serta arahan kebijakan nasional dan daerah. Namun, hasil akhir RKPD sering kali mengalami perubahan, terutama terkait dengan pagu anggaran yang disesuaikan berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang lebih mendalam.

Terdapatnya hasil analisis kebutuhan, terdapat perubahan pada pagu anggaran dalam RKPD akhir. Perubahan ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor program atau kegiatan yang pada awalnya dirumuskan sebagai elemen utama anggaran lebih besar mungkin mengalami penarikan elemen anggaran karena perubahan prioritas pemerintah daerah. Sebaliknya, program baru atau program yang membutuhkan peningkatan kualitas pelayanan mungkin memperoleh tambahan anggaran.

Perbandingan antara rancangan awal RKPD dan hasil akhir yang mengalami perubahan pagu anggaran menunjukkan bahwa proses penyusunan anggaran di tingkat daerah bersifat dinamis dan harus disesuaikan dengan berbagai variabel, termasuk analisis kebutuhan, evaluasi kinerja, serta kebijakan pemerintah pusat. Perubahan pada pagu anggaran bukan hanya mencerminkan upaya aktualisasi, tetapi juga respons terhadap dinamika ekonomi dan sosial yang berkembang di daerah.



Sl. No.	Particulars	2017-18	2018-19	2019-20
1	Salaries	100	100	100
2	Grants	100	100	100
3	Subsidies	100	100	100
4	Capital Expenditure	100	100	100
5	Current Expenditure	100	100	100
6	Reserve	100	100	100
7	Other	100	100	100
8	Total	100	100	100

[Signature]

[Name]

1	1	1	1	1
2	1	1	1	1
3	1	1	1	1
4	1	1	1	1
5	1	1	1	1
6	1	1	1	1
7	1	1	1	1
8	1	1	1	1
9	1	1	1	1
10	1	1	1	1
11	1	1	1	1
12	1	1	1	1
13	1	1	1	1
14	1	1	1	1
15	1	1	1	1
16	1	1	1	1
17	1	1	1	1
18	1	1	1	1
19	1	1	1	1
20	1	1	1	1
21	1	1	1	1
22	1	1	1	1
23	1	1	1	1
24	1	1	1	1
25	1	1	1	1
26	1	1	1	1
27	1	1	1	1
28	1	1	1	1
29	1	1	1	1
30	1	1	1	1
31	1	1	1	1
32	1	1	1	1
33	1	1	1	1
34	1	1	1	1
35	1	1	1	1
36	1	1	1	1
37	1	1	1	1
38	1	1	1	1
39	1	1	1	1
40	1	1	1	1
41	1	1	1	1
42	1	1	1	1
43	1	1	1	1
44	1	1	1	1
45	1	1	1	1
46	1	1	1	1
47	1	1	1	1
48	1	1	1	1
49	1	1	1	1
50	1	1	1	1
51	1	1	1	1
52	1	1	1	1
53	1	1	1	1
54	1	1	1	1
55	1	1	1	1
56	1	1	1	1
57	1	1	1	1
58	1	1	1	1
59	1	1	1	1
60	1	1	1	1
61	1	1	1	1
62	1	1	1	1
63	1	1	1	1
64	1	1	1	1
65	1	1	1	1
66	1	1	1	1
67	1	1	1	1
68	1	1	1	1
69	1	1	1	1
70	1	1	1	1
71	1	1	1	1
72	1	1	1	1
73	1	1	1	1
74	1	1	1	1
75	1	1	1	1
76	1	1	1	1
77	1	1	1	1
78	1	1	1	1
79	1	1	1	1
80	1	1	1	1
81	1	1	1	1
82	1	1	1	1
83	1	1	1	1
84	1	1	1	1
85	1	1	1	1
86	1	1	1	1
87	1	1	1	1
88	1	1	1	1
89	1	1	1	1
90	1	1	1	1
91	1	1	1	1
92	1	1	1	1
93	1	1	1	1
94	1	1	1	1
95	1	1	1	1
96	1	1	1	1
97	1	1	1	1
98	1	1	1	1
99	1	1	1	1
100	1	1	1	1

Year	1990	1991	1992	1993
1990	1991	1992	1993	1994
1995	1996	1997	1998	1999
2000	2001	2002	2003	2004
2005	2006	2007	2008	2009
2010	2011	2012	2013	2014
2015	2016	2017	2018	2019
2020	2021	2022	2023	2024

1	1	1	1	1
2	1	1	1	1
3	1	1	1	1
4	1	1	1	1
5	1	1	1	1
6	1	1	1	1
7	1	1	1	1
8	1	1	1	1
9	1	1	1	1
10	1	1	1	1
11	1	1	1	1
12	1	1	1	1
13	1	1	1	1
14	1	1	1	1
15	1	1	1	1
16	1	1	1	1
17	1	1	1	1
18	1	1	1	1
19	1	1	1	1
20	1	1	1	1
21	1	1	1	1
22	1	1	1	1
23	1	1	1	1
24	1	1	1	1
25	1	1	1	1
26	1	1	1	1
27	1	1	1	1
28	1	1	1	1
29	1	1	1	1
30	1	1	1	1
31	1	1	1	1
32	1	1	1	1
33	1	1	1	1
34	1	1	1	1
35	1	1	1	1
36	1	1	1	1
37	1	1	1	1
38	1	1	1	1
39	1	1	1	1
40	1	1	1	1
41	1	1	1	1
42	1	1	1	1
43	1	1	1	1
44	1	1	1	1
45	1	1	1	1
46	1	1	1	1
47	1	1	1	1
48	1	1	1	1
49	1	1	1	1
50	1	1	1	1
51	1	1	1	1
52	1	1	1	1
53	1	1	1	1
54	1	1	1	1
55	1	1	1	1
56	1	1	1	1
57	1	1	1	1
58	1	1	1	1
59	1	1	1	1
60	1	1	1	1
61	1	1	1	1
62	1	1	1	1
63	1	1	1	1
64	1	1	1	1
65	1	1	1	1
66	1	1	1	1
67	1	1	1	1
68	1	1	1	1
69	1	1	1	1
70	1	1	1	1
71	1	1	1	1
72	1	1	1	1
73	1	1	1	1
74	1	1	1	1
75	1	1	1	1
76	1	1	1	1
77	1	1	1	1
78	1	1	1	1
79	1	1	1	1
80	1	1	1	1
81	1	1	1	1
82	1	1	1	1
83	1	1	1	1
84	1	1	1	1
85	1	1	1	1
86	1	1	1	1
87	1	1	1	1
88	1	1	1	1
89	1	1	1	1
90	1	1	1	1
91	1	1	1	1
92	1	1	1	1
93	1	1	1	1
94	1	1	1	1
95	1	1	1	1
96	1	1	1	1
97	1	1	1	1
98	1	1	1	1
99	1	1	1	1
100	1	1	1	1

Year	2019	2020	2021	2022	2023
1. Total number of students	100	100	100	100	100
2. Number of students who passed	80	80	80	80	80
3. Number of students who failed	20	20	20	20	20
4. Percentage of students who passed	80%	80%	80%	80%	80%
5. Percentage of students who failed	20%	20%	20%	20%	20%
6. Average marks of students who passed	75	75	75	75	75
7. Average marks of students who failed	40	40	40	40	40
8. Overall average marks of all students	60	60	60	60	60

Year	2010	2011	2012	2013	2014
1. Total number of students	100	100	100	100	100
2. Number of students who passed	80	80	80	80	80
3. Number of students who failed	20	20	20	20	20
4. Percentage of students who passed	80%	80%	80%	80%	80%
5. Percentage of students who failed	20%	20%	20%	20%	20%
6. Total number of students who passed in the last 5 years	400	400	400	400	400
7. Total number of students who failed in the last 5 years	100	100	100	100	100
8. Total number of students who passed in the last 5 years as a percentage of the total number of students	80%	80%	80%	80%	80%
9. Total number of students who failed in the last 5 years as a percentage of the total number of students	20%	20%	20%	20%	20%

1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20
21	21	21	21	21	21
22	22	22	22	22	22
23	23	23	23	23	23
24	24	24	24	24	24
25	25	25	25	25	25
26	26	26	26	26	26
27	27	27	27	27	27
28	28	28	28	28	28
29	29	29	29	29	29
30	30	30	30	30	30
31	31	31	31	31	31
32	32	32	32	32	32
33	33	33	33	33	33
34	34	34	34	34	34
35	35	35	35	35	35
36	36	36	36	36	36
37	37	37	37	37	37
38	38	38	38	38	38
39	39	39	39	39	39
40	40	40	40	40	40
41	41	41	41	41	41
42	42	42	42	42	42
43	43	43	43	43	43
44	44	44	44	44	44
45	45	45	45	45	45
46	46	46	46	46	46
47	47	47	47	47	47
48	48	48	48	48	48
49	49	49	49	49	49
50	50	50	50	50	50
51	51	51	51	51	51
52	52	52	52	52	52
53	53	53	53	53	53
54	54	54	54	54	54
55	55	55	55	55	55
56	56	56	56	56	56
57	57	57	57	57	57
58	58	58	58	58	58
59	59	59	59	59	59
60	60	60	60	60	60
61	61	61	61	61	61
62	62	62	62	62	62
63	63	63	63	63	63
64	64	64	64	64	64
65	65	65	65	65	65
66	66	66	66	66	66
67	67	67	67	67	67
68	68	68	68	68	68
69	69	69	69	69	69
70	70	70	70	70	70
71	71	71	71	71	71
72	72	72	72	72	72
73	73	73	73	73	73
74	74	74	74	74	74
75	75	75	75	75	75
76	76	76	76	76	76
77	77	77	77	77	77
78	78	78	78	78	78
79	79	79	79	79	79
80	80	80	80	80	80
81	81	81	81	81	81
82	82	82	82	82	82
83	83	83	83	83	83
84	84	84	84	84	84
85	85	85	85	85	85
86	86	86	86	86	86
87	87	87	87	87	87
88	88	88	88	88	88
89	89	89	89	89	89
90	90	90	90	90	90
91	91	91	91	91	91
92	92	92	92	92	92
93	93	93	93	93	93
94	94	94	94	94	94
95	95	95	95	95	95
96	96	96	96	96	96
97	97	97	97	97	97
98	98	98	98	98	98
99	99	99	99	99	99
100	100	100	100	100	100

1	1	1	1	1	1
2	1	1	1	1	1
3	1	1	1	1	1
4	1	1	1	1	1
5	1	1	1	1	1
6	1	1	1	1	1
7	1	1	1	1	1
8	1	1	1	1	1
9	1	1	1	1	1
10	1	1	1	1	1
11	1	1	1	1	1
12	1	1	1	1	1
13	1	1	1	1	1
14	1	1	1	1	1
15	1	1	1	1	1
16	1	1	1	1	1
17	1	1	1	1	1
18	1	1	1	1	1
19	1	1	1	1	1
20	1	1	1	1	1
21	1	1	1	1	1
22	1	1	1	1	1
23	1	1	1	1	1
24	1	1	1	1	1
25	1	1	1	1	1
26	1	1	1	1	1
27	1	1	1	1	1
28	1	1	1	1	1
29	1	1	1	1	1
30	1	1	1	1	1
31	1	1	1	1	1
32	1	1	1	1	1
33	1	1	1	1	1
34	1	1	1	1	1
35	1	1	1	1	1
36	1	1	1	1	1
37	1	1	1	1	1
38	1	1	1	1	1
39	1	1	1	1	1
40	1	1	1	1	1
41	1	1	1	1	1
42	1	1	1	1	1
43	1	1	1	1	1
44	1	1	1	1	1
45	1	1	1	1	1
46	1	1	1	1	1
47	1	1	1	1	1
48	1	1	1	1	1
49	1	1	1	1	1
50	1	1	1	1	1
51	1	1	1	1	1
52	1	1	1	1	1
53	1	1	1	1	1
54	1	1	1	1	1
55	1	1	1	1	1
56	1	1	1	1	1
57	1	1	1	1	1
58	1	1	1	1	1
59	1	1	1	1	1
60	1	1	1	1	1
61	1	1	1	1	1
62	1	1	1	1	1
63	1	1	1	1	1
64	1	1	1	1	1
65	1	1	1	1	1
66	1	1	1	1	1
67	1	1	1	1	1
68	1	1	1	1	1
69	1	1	1	1	1
70	1	1	1	1	1
71	1	1	1	1	1
72	1	1	1	1	1
73	1	1	1	1	1
74	1	1	1	1	1
75	1	1	1	1	1
76	1	1	1	1	1
77	1	1	1	1	1
78	1	1	1	1	1
79	1	1	1	1	1
80	1	1	1	1	1
81	1	1	1	1	1
82	1	1	1	1	1
83	1	1	1	1	1
84	1	1	1	1	1
85	1	1	1	1	1
86	1	1	1	1	1
87	1	1	1	1	1
88	1	1	1	1	1
89	1	1	1	1	1
90	1	1	1	1	1
91	1	1	1	1	1
92	1	1	1	1	1
93	1	1	1	1	1
94	1	1	1	1	1
95	1	1	1	1	1
96	1	1	1	1	1
97	1	1	1	1	1
98	1	1	1	1	1
99	1	1	1	1	1
100	1	1	1	1	1

Year	2017	2018	2019	2020	2021
Revenue	100	100	100	100	100
Expenses	100	100	100	100	100
Profit	0	0	0	0	0
Assets	100	100	100	100	100
Liabilities	100	100	100	100	100
Equity	0	0	0	0	0
Net Income	0	0	0	0	0
Operating Income	0	0	0	0	0
Pre-tax Income	0	0	0	0	0
Income Tax	0	0	0	0	0
Net Income (after tax)	0	0	0	0	0
Operating Expenses	100	100	100	100	100
Capital Expenses	0	0	0	0	0
Research & Development	0	0	0	0	0
Marketing	0	0	0	0	0
Administrative	0	0	0	0	0
Interest	0	0	0	0	0
Income Tax	0	0	0	0	0
Net Income	0	0	0	0	0
Operating Income	0	0	0	0	0
Pre-tax Income	0	0	0	0	0
Income Tax	0	0	0	0	0
Net Income (after tax)	0	0	0	0	0
Operating Expenses	100	100	100	100	100
Capital Expenses	0	0	0	0	0
Research & Development	0	0	0	0	0
Marketing	0	0	0	0	0
Administrative	0	0	0	0	0
Interest	0	0	0	0	0
Income Tax	0	0	0	0	0
Net Income	0	0	0	0	0
Operating Income	0	0	0	0	0
Pre-tax Income	0	0	0	0	0
Income Tax	0	0	0	0	0
Net Income (after tax)	0	0	0	0	0

Year	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Revenue	100	110	120	130	140	150	160	170	180
Expenses	80	85	90	95	100	105	110	115	120
Profit	20	25	30	35	40	45	50	55	60

Table 1: Financial Performance Data (2018-2026)

3	Pengawasan Kualitas ESG Green/Tanaman	Bendahara Umum	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Kualitas ESG Green/Tanaman	10 orang	10 orang (Murni)
4	Pengawasan Produk Bawah Tanah dan KPT, Selain Pabrik/Pabrik	Set. Operasional	Jumlah Pengawasan Produk Bawah Tanah dan KPT, Selain Pabrik/Pabrik	10 orang	10 orang (Murni)
5	Pengawasan Kegiatan Perburuan Sayu dan Kaci	Manajemen Operasional	Jumlah Kegiatan Perburuan Sayu dan Kaci yang Mengikuti Pengawasan Kegiatan	10 orang	10 orang (Murni)
6	Pengawasan Produk Bawah Tanah dan KPT, Selain Pabrik/Pabrik	Ditjen, Ditjen	Jumlah Pengawasan Produk Bawah Tanah dan KPT, Selain Pabrik/Pabrik	10 orang	10 orang (Murni)
7	Pengawasan Kegiatan Perburuan Sayu dan Kaci	Ditjen, Ditjen	Jumlah Kegiatan Perburuan Sayu dan Kaci yang Mengikuti Pengawasan Kegiatan	10 orang	10 orang (Murni)
8	Remisi dan Pemantauan Persepsi/Persepsi dan di Darat	Ditjen, Ditjen	Jumlah Persepsi/Persepsi yang Memeroleh Persepsi dan Pemantauan Persepsi/Persepsi dan di Darat	10 orang	10 orang (Murni)
9	Pengawasan Produk Bawah Tanah dan KPT, Selain Pabrik/Pabrik	Ditjen, Ditjen	Jumlah Pengawasan Produk Bawah Tanah dan KPT, Selain Pabrik/Pabrik	10 orang	10 orang (Murni)
10	Pengawasan Kegiatan Perburuan Sayu dan Kaci	Manajemen Operasional	Jumlah Kegiatan Perburuan Sayu dan Kaci yang Mengikuti Pengawasan Kegiatan	10 orang	10 orang (Murni)
11	Remisi dan Pemantauan Persepsi/Persepsi dan di Darat	Ditjen, Ditjen	Jumlah Persepsi/Persepsi yang Memeroleh Persepsi dan Pemantauan Persepsi/Persepsi dan di Darat	10 orang	10 orang (Murni)



16	Pelayanan dan Pemantauan Penanggulangan ISHA di Darat	Survei, Logistik	Lurah Penanggulangan yang telah selesai Penilaian dan Pemantauan Penanggulangan ISHA di Darat	10 orang	Korwil penanggulangan ISHA (Surabaya) (Murnaningrum)
17	Pengelolaan Produk Berah (Gigitan Tarek dan KPT, Gigitan Tikus, Tikus)	Prosedur, Pemantauan	Lurah Tanggapan Prosedur Berah, Gigitan Tarek dan KPT, Gigitan Tikus / Tikus	10 orang	Pejabat tingkat penanggulangan ISHA (Murnaningrum)
18	Pengembangan Kapasitas Riset/Logis Peningkatan Keselamatan dan Daya	Prosedur, Pemantauan	Lurah Kebijakan Peningkatan Keselamatan dan Daya yang ditugaskan/terseleksi	10 orang	Pejabat tingkat penanggulangan ISHA (Murnaningrum)
19	Pengembangan Kapasitas Riset/Logis Peningkatan Keselamatan dan Daya	Survei, Pemantauan	Lurah Kebijakan Gigitan yang ditugaskan/terseleksi	10 orang	Pejabat tingkat penanggulangan ISHA (Murnaningrum)
20	Pengembangan Kapasitas Riset/Logis Peningkatan Keselamatan dan Daya	Gigitan, Keselamatan	Lurah Kebijakan Peningkatan Keselamatan dan Daya yang ditugaskan/terseleksi	10 orang	Pejabat tingkat penanggulangan ISHA (Murnaningrum)
21	Pelayanan dan Pemantauan Penanggulangan ISHA di Darat	Survei, Logistik	Lurah Penanggulangan yang telah selesai Penilaian dan Pemantauan Penanggulangan ISHA di Darat	10 orang	Korwil penanggulangan ISHA (Surabaya) (Murnaningrum)
22	Pelayanan dan Pemantauan Penanggulangan ISHA di Darat	Survei, Logistik	Lurah Penanggulangan yang telah selesai Penilaian dan Pemantauan Penanggulangan ISHA di Darat	10 orang	Korwil penanggulangan ISHA (Surabaya) (Murnaningrum)
23	Pengembangan Kapasitas dan Pemantauan dan Daya Peningkatan Keselamatan dan Daya (Survei) Daerah Kabupaten/Kota	Survei, Logistik	Lurah Peningkatan Keselamatan dan Daya yang ditugaskan/terseleksi Peningkatan Keselamatan dan Daya (Survei) Daerah Kabupaten/Kota	10 orang	Pejabat tingkat penanggulangan ISHA dalam rangka mendukung peningkatan keselamatan dan daya penanggulangan ISHA (Murnaningrum)



22	Peningkatan Keterampilan dan umrah Kompetensi dan Literasi Pengabdian dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembicara, Orator	Jumlah Penampilan Keasessitas dan umrah Kompetensi dan Literasi Pengabdian dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	20 orang	Peningkatan dan perbaikan hasil dan dalam rangka mendukung makna bergizi dan kesehatan masyarakat (Kusnasong)
23	Peningkatan Keterampilan dan umrah Kompetensi dan Literasi Pengabdian dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dagapan, Orator	Jumlah Penampilan Keasessitas dan umrah Kompetensi dan Literasi Pengabdian dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	20 orang	Peningkatan dan perbaikan hasil dan dalam rangka mendukung makna bergizi dan kesehatan masyarakat (Kusnasong)



BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bitar selain didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan tugas dan fungsi, juga didasarkan pada rencana kerangka kebijakan Nasional.

3.1. Tujuan dan Sasaran Kebijakan Nasional

Isyarat Strategi Kementerian Pertanian merupakan indikator kinerja Kementerian Pertanian dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Isyarat Strategi (IS) dan indikator kinerja utama yang ingin dicapai adalah:

ISS1. Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri, dengan indikator kinerja:

1. Tersedianya ketersediaan produksi pangan strategis dalam negeri.

ISS2. Meningkatnya daya saing komoditas pertanian nasional, dengan indikator kinerja:

1. Peningkatan volume ekspor untuk produk pertanian nasional;
2. Peningkatan komposisi ekspor pertanian yang diolah negara tujuan.

ISS3. Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional dengan indikator kinerja:

1. Peningkatan keamanan dan mutu pangan strategis nasional;
2. Peningkatan luas pelaksanaan sertifikasi yang diwajibkan.

ISS4. Tersedianya inovasi dan teknologi pertanian, dengan indikator kinerja:

1. Peningkatan hasil penelitian yang dimanfaatkan;
2. Teknologi yang ditransfer ke petani pertanian.

ISS5. Tersedianya prasarana dan sarana pertanian yang sesuai kebutuhan, dengan indikator kinerja:

1. Indeks ketersediaan prasarana pertanian yang sesuai pemenuhan;
2. Indeks ketersediaan sarana pertanian yang sesuai pemenuhan.



126. Terwujudnya penyuluhan Organisasi Pengggaru Tambahan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) pada tanaman serta penyakit pada hewan, dengan indikator kinerja:
1. Persentase anggaran OPT dan DPI yang ditangani
 2. Persentase wilayah yang terdampak dari penyakit hewan melalui strategi
 3. Serentitas tindakan karantina terhadap semua Organisasi Pengggaru Tambahan Karantina (OPTK) dan Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK).
127. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kolaborasi Pertanian Nasional, dengan indikator kinerja:
1. Persentase SDM pertanian dan kolaborasi petani yang meningkat kapasitasnya
 2. Persentase lulusan pendidikan pertanian yang bekerja di bidang pertanian.
128. Terlengkapinya kinerja Kementerian Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima, dengan indikator kinerja:
1. Nilai reformasi birokrasi Kementerian Pertanian.
129. Terwujudnya anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas, dengan indikator kinerja:
1. Nilai kinerja anggaran Kementerian Pertanian.

Rincian Diturunkan dan Perincian Kabupaten Elitir dalam rangka mendukung pelaksanaan sasaran strategis dan sasaran prioritas Rencana Kementerian Pertanian telah ditandatangani pejabat tingkat bupati, tahun dan nomor di wilayah Kabupaten Elitir pada tahun 2024-2024.



Di antara Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Blitar juga mengoptimalkan pada Rencana Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur sehingga dibungkus Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Blitar dalam rangka melaksanakan Rencana Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur adalah:

1. Peningkatan sumber protein hewani dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas bibit ternak serta meningkatkannya produktivitas ternak;
2. Peningkatan pemeliharaan dan pengendalian penyakit ternak strategis;
3. Peningkatan pengawasan program Fungsionalisasi Hewan (FAB) sesuai APCH.

Pada sektor kelautan dan perikanan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Perikanan juga dilaksanakan dalam mendukung program kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur. Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur berdasarkan Rencana Kerja APBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2026 yaitu "Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan".

Dinas Kelautan dan perikanan Provinsi Jawa Timur mendukung sasaran RDD yaitu "Meningkatnya nilai tambah ekonomi" dengan indikator sasaran "Persentase pertumbuhan PDPS sub kategori perikanan". Tujuan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur adalah "Meningkatkan pertumbuhan PDPS Sub Kategori Perikanan". Adapun sasaran dari tujuan pertama meliputi:

1. Meningkatkan daya saing sektor kelautan dan perikanan
2. Meningkatkan Akutabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Strategi (S1) dan arah kebijakan (S2) Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur dari sasaran (S1) yang ada diimplementasikan sebagai berikut:

- S1. Meningkatkan nilai tambah sub kategori perikanan.
 - S1.1. Meningkatkan produksi perikanan budidaya.
 - K1.1. Meningkatkan produksi perikanan budidaya di Jawa Timur.
 - S1.2. Meningkatkan produksi perikanan tangkap.
 - K1.1. Meningkatkan produksi perikanan tangkap di Jawa Timur.
 - K1.2. Meningkatkan pendapatan.
 - S1.3. Meningkatkan produksi abalaba dan akuakultur.
 - K1.1. Meningkatkan produksi perikanan tangkap di Jawa Timur.
 - K1.2. Meningkatkan pendapatan.
 - S1.4. Meningkatkan pemanfaatan ruang laut sesuai zonasi dengan teknologi tepat guna.
 - K1.1. Meningkatkan pemanfaatan ruang laut melalui konsultasi strategis.

- 3d. Meningkatkan pelayanan pengujian mutu dan pengamanan produk hasil perikanan
 - K1. Meningkatkan produk hasil perikanan yang bersertifikat mutu.
- 3d6. Meningkatkan produksi hasil ikan air payau dan laut.
 - K1. Meningkatkan pelayanan pelaku usaha pembudidaya ikan (air Tawar).
- 3d7. Meningkatkan pelayanan kesehatan ikan dan lingkungan.
 - K1. Meningkatkan jumlah pelaku usaha yang terakreditasi pelayanan Kesehatan ikan dan lingkungan.
- 3d8. Meningkatkan kompetensi pelaku usaha dibidang kelautan dan perikanan.
 - K1. Meningkatkan pelayanan pelatihan teknis pelaku usaha dibidang Kelautan dan perikanan di Jawa Timur.
- 3d9. Meningkatkan akses rehabilitasi ekosistem kelautan dan perikanan
 - K1. Mengendalikan dan sumber daya kelautan dan perikanan.
- 3d11. Meningkatkan pelayanan Pelabuhan perikanan.
 - K1. Meningkatkan pelayanan Pelabuhan perikanan di Jawa Timur.
- 3d2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
 - K1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja ASN.
 - K1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja ASN Dinas Kelautan dan Perikanan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Dinas Perikanan dan Perikanan

Tujuan RENCANA Kabupaten Blitar Tahun 2018 adalah "Peningkatan Infrastruktur Ekonomi dan Hilirisasi Pertanian Didukung Inovasi dan Sumber Daya Manusia Unggul yang Inklusif. Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Blitar sesuai dengan RENCANA Kabupaten Blitar Tahun 2018 ditunjukkan sebagai berikut:

1. Peningkatan Efektivitas Infrastruktur yang Berkelanjutan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
2. Peningkatan Efektifitas Sapan dan Pengembangan Hilirisasi Pertanian;
3. Pemberdayaan Masyarakat, Penguatan UMKM dan Industri, serta Pengembangan Fasilitas dan Daya Saing Energi untuk Pengembangan Ekonomi;
4. Pembangunan SDM yang Inklusif dan Perlindungan Sosial yang Adaptif dan
5. Peningkatan Efektifitas, Efisiensi Umum, dan Kualitas Pelayanan Public;

Rencana Perencanaan dan Pelaksanaan Kabupaten Blitar sesuai dengan tugas pokok

Angka untuk tahun 2024 mendukung prioritas pembangunan kedua yaitu Peningkatan Ketahanan Pangan dan Pengembangan Wilayah Pertanian:

Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Elitir untuk tahun 2024 menetapkan tujuan dengan rumusan sebagai berikut:

Tujuan	Indikator Tujuan	Strategi	Indikator Strategi
7.1 Meningkatkan kinerja masyarakat Sektor peternakan dan perikanan	7.1.1 Kesehatan Sektor perikanan terhadap PORE	5.1 Meningkatkan Akurabilitas Rincia Perikanan Daerah	5.1.1 Nilai SAKP perangkap darah
		5.2 Meningkatkan produksi hasil perikanan	5.2.1 Persentase Peningkatan Produksi Perikanan
	7.1.2 Kesehatan sapi sektor peternakan terhadap PORE	5.3 Meningkatkan produksi dan inovasi produk peternakan	5.3.1 Persentase Peningkatan Produksi Peternakan
			5.3.2 Persentase Wilayah yang terdampak dan proyek hwan masalah strategi
			5.3.3 Persentase Produk Peternakan Yang Layak Edar



3.5. Program dan Kegiatan

Dalam merencanakan program dan kegiatan pada Dinas Perikanan dan Perikanan, terdapat sejumlah faktor yang harus dipertimbangkan untuk memastikan program-program tersebut selaras dengan tujuan strategis daerah, nasional. Perumusan program dan kegiatan pada Dinas Perikanan dan Perikanan tidak hanya didasarkan pada kebutuhan operasional, tetapi juga harus memperhatikan berbagai aspek strategis seperti visi dan misi kepala daerah, pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), kepentingan kemiskinan, penanganan stunting dan pengarusutamaan gender. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, diharapkan program-program yang diusung dapat memberikan dampak positif yang luas bagi masyarakat dan lingkungan, serta berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Bilian.

Tabel 7.

Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024

KODE	AKSI/KEGIATAN	INDIKATOR	SIMPULAN
	INDUKSI/REKONSTRUKSI/REKONSTRUKSI	REKONSTRUKSI/REKONSTRUKSI	
1	2	3	4
00000	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan	Tingkat kelengkapan dokumen perencanaan	
00000.001	Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaksanaan Kegiatan Persekolahan	Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaksanaan Kegiatan Persekolahan yang meliputi rencana dan realisasi anggaran pendidikan	
00000.001.001	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Persekolahan	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Persekolahan	
00000.001.001.001	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Persekolahan	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Persekolahan	
00000.001.001.001.001	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Persekolahan	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Persekolahan	
00000.001.001.001.001.001	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Persekolahan	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Persekolahan	
00000.001.001.001.001.001.001	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Persekolahan	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Persekolahan	
00000.001.001.001.001.001.001.001	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Persekolahan	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Persekolahan	
00000.001.001.001.001.001.001.001.001	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Persekolahan	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Persekolahan	
00000.001.001.001.001.001.001.001.001.001	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Persekolahan	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Persekolahan	
00000.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Persekolahan	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Persekolahan	
00000.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001.001	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Persekolahan	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Persekolahan	

1210400000	Talangan Fasilitas Perawatan dan Pengembangan Kelembagaan/Program Baru	jumlah anggaran belanja modal yang termasuk Perawatan dan Pengembangan Kelembagaan	
1210400000	Talangan Fasilitas Service Perawatan Service Perawatan, Bantuan teknis	jumlah Dns Dns yang termasuk Fasilitas Service Perawatan, Bantuan teknis	
1210400000	Layanan Jasa dan Jasa Lainnya (termasuk jasa biaya tidak)	jumlah jasa dan lainnya termasuk jasa biaya tidak	Memang ada 17%
1210400000	Pengadaan dan Pengembangan Tempat Parkir Baru (TPB)	jumlah Fasilitas Perawatan & TPB	
1210400000	Layanan Pengembangan Tempat Parkir Baru (TPB)	jumlah layanan dalam rangka Pengembangan Tempat Parkir Baru (TPB)	
1210400000	Perawatan Tenda Dapur Gagal Perawatan Sarafan sampai dengan 22 01 di Pelayan Bangun, Bangun, Pabrik Baru, dan Bangunan dan layanan yang dapat disediakan dalam 1 (satu) bulan	jumlah kapal Perawatan yang diadahi	
1210400000	Layanan Perawatan Tenda Dapur Gagal Perawatan Sarafan sampai dengan 22 01	jumlah Perawatan Tenda Dapur Gagal Perawatan	
1210400000	Perawatan Perbaikan Perbaikan Perbaikan Perbaikan	jumlah Fasilitas Perawatan Perawatan untuk Perbaikan Perawatan dan Bantuan / dan	
1210400000	Perawatan Perbaikan Perbaikan Perbaikan Perbaikan	jumlah Perbaikan dan Dns yang diadahi	
1210400000	Pengembangan Layanan Fasilitas Baru dan Baru	jumlah anggaran Fasilitas Baru dan Baru yang termasuk Pengembangan Fasilitas	
1210400000	Talangan Fasilitas Perawatan dan Pengembangan Kelembagaan/Fasilitas Baru dan Baru	jumlah anggaran Fasilitas Baru dan Baru yang termasuk Perawatan dan Pengembangan Kelembagaan	
1210400000	Talangan Fasilitas Service Perawatan Service Perawatan, Bantuan teknis	jumlah anggaran Dns yang termasuk Fasilitas Perawatan, Bantuan teknis, Fasilitas, Bantuan teknis	
1210400000	Pengadaan Perbaikan Perbaikan dan	jumlah Pengadaan Perbaikan Perbaikan dan yang diadahi	
1210400000	Pengadaan dan dan lainnya Perbaikan Perbaikan dan dalam 1 (satu) bulan/kegiatan/atau	jumlah dan dan lainnya Perbaikan Perbaikan dan dalam 1 (satu) bulan/kegiatan/atau	
1210400000	Pengadaan Perbaikan Perbaikan Perbaikan Perbaikan dan dalam 1 (satu) bulan/kegiatan/atau	jumlah Perbaikan Perbaikan dan dalam 1 (satu) bulan/kegiatan/atau	
1210400000	Pengadaan Fasilitas Baru dan Lainnya Fasilitas Baru dan dalam 1 (satu) bulan/kegiatan/atau	jumlah dan dan lainnya Fasilitas Baru dan dalam 1 (satu) bulan/kegiatan/atau yang termasuk Fasilitas Baru dan Baru	
1210400000	Pengadaan Perbaikan Perbaikan Perbaikan Perbaikan dan dalam 1 (satu) bulan/kegiatan/atau	jumlah Perbaikan Perbaikan dan dalam 1 (satu) bulan/kegiatan/atau	



BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Sesuai dengan Rencana Strategis yang telah ditetapkan, Dinas Perikanan dan Perikanan Kemitraan untuk meningkatkan peran nasional masyarakat yang bergerak di bidang perikanan dan perikanan. Untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, secara garis besar terdapat 14 (sibolek) program, 28 (dua puluh sibolek) kegiatan dan 60 (60) sub kegiatan yang direncanakan dalam mendukung pencapaian kinerja di Dinas Perikanan dan Perikanan. Pelaksanaan program dan kegiatan dilaksanakan di wilayah Kabupaten Sukoharjo dengan kelompok sasaran nelayan, pembudidaya ikan, pelaku usaha di bidang ikan, dan peternak.

Kegiatan/program tersebut terdapat dalam dua urusan pemerintahan, yaitu urusan kelautan dan perikanan serta urusan pertanian (subsektor perikanan) yang secara garis besar untuk mendukung misi daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terdapat beberapa perbedaan ada kegiatan, indikator dan target antara pagu anggaran yang ada pada Rencana RKPD dengan Rencana Kerja 2018. Hal ini dikarenakan terdapat penyusunan Anggaran Rancangan Rencana Tahun 2018-2019. Sehingga seluruh program dan kegiatan yang direncanakan tetap berada dalam koridor perencanaan jangka menengah daerah, serta menjamin keberlanjutan pencapaian tujuan pembangunan daerah yang lebih terarah, terukur, dan berkesinambungan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada pengumpulan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam tabel berikut.

Tabel 8

Penetapan Indikator Kinerja Dinas Perikanan dan Perikanan

No	Indikator Tujuan/ Sasaran	Januari	Target Tahun 2018
1.	Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB	%	4,50
2.	Kesejahteraan Sekt Perikanan terhadap PDRB	%	12,00
Indikator Sasaran			
1.	Nilai Sekt Perikanan Daerah	Angka	73,8
2.	Peningkatan pertumbuhan produksi perikanan	%	
	Perikanan Tangkap		0,3
	Perikanan Budidaya (Konservasi)		1,5
	Perikanan Budidaya (New Komoditas/Nilai)		0,2
3.	Peningkatan Peningkatan Produk	%	

Kendala Pemasaran			
	Daging	4,00	
	Tela	3,50	
	Susu	1,40	
3	Persentase wilayah yang terlembai dan penyajiit hewan mamalia strategis	%	94
4	Persentase Produk Pemasaran Yang Layak Ekspor	%	98,1
Indikator Kinerja Kunci			
1.	Jumlah produksi perikanan tangkap	Ton	3.215
2.	Jumlah produksi perikanan konsumsi	Ton	18.177
3.	Jumlah produksi perikanan non konsumsi (sisa)	Ekor	135.256.930
4.	Persentase Penajabatan Produkul Kesehatan Pemasaran	%	
	Daging		4,00
	Tela		3,50
	Susu		1,40
2.	Persentase wilayah yang terlembai dan penyajiit hewan mamalia strategis	%	94



Year	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1																						
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						
11																						
12																						
13																						
14																						
15																						
16																						
17																						
18																						
19																						
20																						
21																						
22																						
23																						
24																						
25																						
26																						
27																						
28																						
29																						
30																						
31																						
32																						
33																						
34																						
35																						
36																						
37																						
38																						
39																						
40																						
41																						
42																						
43																						
44																						
45																						
46																						
47																						
48																						
49																						
50																						

● **Table 1**

Year	Country	Sector	Emissions (kt CO ₂ e)			Emissions (kt CO ₂ e)			Total (kt CO ₂ e)	Growth (%)
			2000	2005	2010	2000	2005	2010		
2000	USA	Manufacturing and construction	10000	10000	10000	10000	10000	10000	0	
2005	USA	Manufacturing and construction	10000	10000	10000	10000	10000	10000	0	
2010	USA	Manufacturing and construction	10000	10000	10000	10000	10000	10000	0	
2000	China	Manufacturing and construction	10000	10000	10000	10000	10000	10000	0	
2005	China	Manufacturing and construction	10000	10000	10000	10000	10000	10000	0	
2010	China	Manufacturing and construction	10000	10000	10000	10000	10000	10000	0	
2000	India	Manufacturing and construction	10000	10000	10000	10000	10000	10000	0	
2005	India	Manufacturing and construction	10000	10000	10000	10000	10000	10000	0	
2010	India	Manufacturing and construction	10000	10000	10000	10000	10000	10000	0	
2000	Japan	Manufacturing and construction	10000	10000	10000	10000	10000	10000	0	
2005	Japan	Manufacturing and construction	10000	10000	10000	10000	10000	10000	0	
2010	Japan	Manufacturing and construction	10000	10000	10000	10000	10000	10000	0	
2000	EU	Manufacturing and construction	10000	10000	10000	10000	10000	10000	0	
2005	EU	Manufacturing and construction	10000	10000	10000	10000	10000	10000	0	
2010	EU	Manufacturing and construction	10000	10000	10000	10000	10000	10000	0	

1. Introduction

Year	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
2018	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105
2019	12	18	25	32	38	45	52	58	65	72	78	85	92	98	105	112	118	125	132	138
2020	15	22	30	38	45	52	60	68	75	82	90	98	105	112	120	128	135	142	150	158
2021	18	25	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205
2022	20	28	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210
2023	22	30	45	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215
2024	25	35	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220
2025	28	40	55	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225
2026	30	45	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230
2027	32	50	65	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235
2028	35	55	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240
2029	38	60	75	85	95	105	115	125	135	145	155	165	175	185	195	205	215	225	235	245
2030	40	65	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250

Year	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
U.S. GDP (billions of dollars)	7,000	7,200	7,400	7,600	7,800	8,000	8,200	8,400	8,600	8,800	9,000	9,200	9,400	9,600	9,800	10,000	10,200	10,400	10,600	10,800	11,000	11,200	11,400	11,600	11,800	12,000	12,200	12,400	12,600	12,800	13,000	13,200	13,400	13,600	13,800	14,000	14,200	14,400	14,600	14,800	15,000	15,200	15,400	15,600	15,800	16,000	16,200	16,400	16,600	16,800	17,000	17,200	17,400	17,600	17,800	18,000	18,200	18,400	18,600	18,800	19,000	19,200	19,400	19,600	19,800	20,000	20,200	20,400	20,600	20,800	21,000	21,200	21,400	21,600	21,800	22,000	22,200	22,400	22,600	22,800	23,000	23,200	23,400	23,600	23,800	24,000	24,200	24,400	24,600	24,800	25,000	25,200	25,400	25,600	25,800	26,000	26,200	26,400	26,600	26,800	27,000	27,200	27,400	27,600	27,800	28,000	28,200	28,400	28,600	28,800	29,000	29,200	29,400	29,600	29,800	30,000	30,200	30,400	30,600	30,800	31,000	31,200	31,400	31,600	31,800	32,000	32,200	32,400	32,600	32,800	33,000	33,200	33,400	33,600	33,800	34,000	34,200	34,400	34,600	34,800	35,000	35,200	35,400	35,600	35,800	36,000	36,200	36,400	36,600	36,800	37,000	37,200	37,400	37,600	37,800	38,000	38,200	38,400	38,600	38,800	39,000	39,200	39,400	39,600	39,800	40,000	40,200	40,400	40,600	40,800	41,000	41,200	41,400	41,600	41,800	42,000	42,200	42,400	42,600	42,800	43,000	43,200	43,400	43,600	43,800	44,000	44,200	44,400	44,600	44,800	45,000	45,200	45,400	45,600	45,800	46,000	46,200	46,400	46,600	46,800	47,000	47,200	47,400	47,600	47,800	48,000	48,200	48,400	48,600	48,800	49,000	49,200	49,400	49,600	49,800	50,000	50,200	50,400	50,600	50,800	51,000	51,200	51,400	51,600	51,800	52,000	52,200	52,400	52,600	52,800	53,000	53,200	53,400	53,600	53,800	54,000	54,200	54,400	54,600	54,800	55,000	55,200	55,400	55,600	55,800	56,000	56,200	56,400	56,600	56,800	57,000	57,200	57,400	57,600	57,800	58,000	58,200	58,400	58,600	58,800	59,000	59,200	59,400	59,600	59,800	60,000	60,200	60,400	60,600	60,800	61,000	61,200	61,400	61,600	61,800	62,000	62,200	62,400	62,600	62,800	63,000	63,200	63,400	63,600	63,800	64,000	64,200	64,400	64,600	64,800	65,000	65,200	65,400	65,600	65,800	66,000	66,200	66,400	66,600	66,800	67,000	67,200	67,400	67,600	67,800	68,000	68,200	68,400	68,600	68,800	69,000	69,200	69,400	69,600	69,800	70,000	70,200	70,400	70,600	70,800	71,000	71,200	71,400	71,600	71,800	72,000	72,200	72,400	72,600	72,800	73,000	73,200	73,400	73,600	73,800	74,000	74,200	74,400	74,600	74,800	75,000	75,200	75,400	75,600	75,800	76,000	76,200	76,400	76,600	76,800	77,000	77,200	77,400	77,600	77,800	78,000	78,200	78,400	78,600	78,800	79,000	79,200	79,400	79,600	79,800	80,000	80,200	80,400	80,600	80,800	81,000	81,200	81,400	81,600	81,800	82,000	82,200	82,400	82,600	82,800	83,000	83,200	83,400	83,600	83,800	84,000	84,200	84,400	84,600	84,800	85,000	85,200	85,400	85,600	85,800	86,000	86,200	86,400	86,600	86,800	87,000	87,200	87,400	87,600	87,800	88,000	88,200	88,400	88,600	88,800	89,000	89,200	89,400	89,600	89,800	90,000	90,200	90,400	90,600	90,800	91,000	91,200	91,400	91,600	91,800	92,000	92,200	92,400	92,600	92,800	93,000	93,200	93,400	93,600	93,800	94,000	94,200	94,400	94,600	94,800	95,000	95,200	95,400	95,600	95,800	96,000	96,200	96,400	96,600	96,800	97,000	97,200	97,400	97,600	97,800	98,000	98,200	98,400	98,600	98,800	99,000	99,200	99,400	99,600	99,800	100,000

Year	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14	Q15	Q16	Q17	Q18	Q19	Q20	Q21	Q22	Q23	Q24	Q25	Q26	Q27	Q28	Q29	Q30	Q31	Q32	Q33	Q34	Q35	Q36	Q37	Q38	Q39	Q40	Q41	Q42	Q43	Q44	Q45	Q46	Q47	Q48	Q49	Q50	Q51	Q52	Q53	Q54	Q55	Q56	Q57	Q58	Q59	Q60	Q61	Q62	Q63	Q64	Q65	Q66	Q67	Q68	Q69	Q70	Q71	Q72	Q73	Q74	Q75	Q76	Q77	Q78	Q79	Q80	Q81	Q82	Q83	Q84	Q85	Q86	Q87	Q88	Q89	Q90	Q91	Q92	Q93	Q94	Q95	Q96	Q97	Q98	Q99	Q100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
2010	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3.0	3.3	3.6	3.9	4.2	4.5	4.8	5.1	5.4	5.7	6.0	6.3	6.6	6.9	7.2	7.5	7.8	8.1	8.4	8.7	9.0	9.3	9.6	9.9	10.2	10.5	10.8	11.1	11.4	11.7	12.0	12.3	12.6	12.9	13.2	13.5	13.8	14.1	14.4	14.7	15.0	15.3	15.6	15.9	16.2	16.5	16.8	17.1	17.4	17.7	18.0	18.3	18.6	18.9	19.2	19.5	19.8	20.1	20.4	20.7	21.0	21.3	21.6	21.9	22.2	22.5	22.8	23.1	23.4	23.7	24.0	24.3	24.6	24.9	25.2	25.5	25.8	26.1	26.4	26.7	27.0	27.3	27.6	27.9	28.2	28.5	28.8	29.1	29.4	29.7	30.0	30.3	30.6	30.9	31.2	31.5	31.8	32.1	32.4	32.7	33.0	33.3	33.6	33.9	34.2	34.5	34.8	35.1	35.4	35.7	36.0	36.3	36.6	36.9	37.2	37.5	37.8	38.1	38.4	38.7	39.0	39.3	39.6	39.9	40.2	40.5	40.8	41.1	41.4	41.7	42.0	42.3	42.6	42.9	43.2	43.5	43.8	44.1	44.4	44.7	45.0	45.3	45.6	45.9	46.2	46.5	46.8	47.1	47.4	47.7	48.0	48.3	48.6	48.9	49.2	49.5	49.8	50.1	50.4	50.7	51.0	51.3	51.6	51.9	52.2	52.5	52.8	53.1	53.4	53.7	54.0	54.3	54.6	54.9	55.2	55.5	55.8	56.1	56.4	56.7	57.0	57.3	57.6	57.9	58.2	58.5	58.8	59.1	59.4	59.7	60.0	60.3	60.6	60.9	61.2	61.5	61.8	62.1	62.4	62.7	63.0	63.3	63.6	63.9	64.2	64.5	64.8	65.1	65.4	65.7	66.0	66.3	66.6	66.9	67.2	67.5	67.8	68.1	68.4	68.7	69.0	69.3	69.6	69.9	70.2	70.5	70.8	71.1	71.4	71.7	72.0	72.3	72.6	72.9	73.2	73.5	73.8	74.1	74.4	74.7	75.0	75.3	75.6	75.9	76.2	76.5	76.8	77.1	77.4	77.7	78.0	78.3	78.6	78.9	79.2	79.5	79.8	80.1	80.4	80.7	81.0	81.3	81.6	81.9	82.2	82.5	82.8	83.1	83.4	83.7	84.0	84.3	84.6	84.9	85.2	85.5	85.8	86.1	86.4	86.7	87.0	87.3	87.6	87.9	88.2	88.5	88.8	89.1	89.4	89.7	90.0	90.3	90.6	90.9	91.2	91.5	91.8	92.1	92.4	92.7	93.0	93.3	93.6	93.9	94.2	94.5	94.8	95.1	95.4	95.7	96.0	96.3	96.6	96.9	97.2	97.5	97.8	98.1	98.4	98.7	99.0	99.3	99.6	99.9	100.2	100.5	100.8	101.1	101.4	101.7	102.0	102.3	102.6	102.9	103.2	103.5	103.8	104.1	104.4	104.7	105.0	105.3	105.6	105.9	106.2	106.5	106.8	107.1	107.4	107.7	108.0	108.3	108.6	108.9	109.2	109.5	109.8	110.1	110.4	110.7	111.0	111.3	111.6	111.9	112.2	112.5	112.8	113.1	113.4	113.7	114.0	114.3	114.6	114.9	115.2	115.5	115.8	116.1	116.4	116.7	117.0	117.3	117.6	117.9	118.2	118.5	118.8	119.1	119.4	119.7	120.0	120.3	120.6	120.9	121.2	121.5	121.8	122.1	122.4	122.7	123.0	123.3	123.6	123.9	124.2	124.5	124.8	125.1	125.4	125.7	126.0	126.3	126.6	126.9	127.2	127.5	127.8	128.1	128.4	128.7	129.0	129.3	129.6	129.9	130.2	130.5	130.8	131.1	131.4	131.7	132.0	132.3	132.6	132.9	133.2	133.5	133.8	134.1	134.4	134.7	135.0	135.3	135.6	135.9	136.2	136.5	136.8	137.1	137.4	137.7	138.0	138.3	138.6	138.9	139.2	139.5	139.8	140.1	140.4	140.7	141.0	141.3	141.6	141.9	142.2	142.5	142.8	143.1	143.4	143.7	144.0	144.3	144.6	144.9	145.2	145.5	145.8	146.1	146.4	146.7	147.0	147.3	147.6	147.9	148.2	148.5	148.8	149.1	149.4	149.7	150.0	150.3	150.6	150.9	151.2	151.5	151.8	152.1	152.4	152.7	153.0	153.3	153.6	153.9	154.2	154.5	154.8	155.1	155.4	155.7	156.0	156.3	156.6	156.9	157.2	157.5	157.8	158.1	158.4	158.7	159.0	159.3	159.6	159.9	160.2	160.5	160.8	161.1	161.4	161.7	162.0	162.3	162.6	162.9	163.2	163.5	163.8	164.1	164.4	164.7	165.0	165.3	165.6	165.9	166.2	166.5	166.8	167.1	167.4	167.7	168.0	168.3	168.6	168.9	169.2	169.5	169.8	170.1	170.4	170.7	171.0	171.3	171.6	171.9	172.2	172.5	172.8	173.1	173.4	173.7	174.0	174.3	174.6	174.9	175.2	175.5	175.8	176.1	176.4	176.7	177.0	177.3	177.6	177.9	178.2	178.5	178.8	179.1	179.4	179.7	180.0	180.3	180.6	180.9	181.2	181.5	181.8	182.1	182.4	182.7	183.0	183.3	183.6	183.9	184.2	184.5	184.8	185.1	185.4	185.7	186.0	186.3	186.6	186.9	187.2	187.5	187.8	188.1	188.4	188.7	189.0	189.3	189.6	189.9	190.2	190.5	190.8	191.1	191.4	191.7	192.0	192.3	192.6	192.9	193.2	193.5	193.8	194.1	194.4	194.7	195.0	195.3	195.6	195.9	196.2	196.5	196.8	197.1	197.4	197.7	198.0	198.3	198.6	198.9	199.2	199.5	199.8	200.1	200.4	200.7	201.0	201.3	201.6	201.9	202.2	202.5	202.8	203.1	203.4	203.7	204.0	204.3	204.6	204.9	205.2	205.5	205.8	206.1	206.4	206.7	207.0	207.3	207.6	207.9	208.2	208.5	208.8	209.1	209.4	209.7	210.0	210.3	210.6	210.9	211.2	211.5	211.8	212.1	212.4	212.7	213.0	213.3	213.6	213.9	214.2	214.5	214.8	215.1	215.4	215.7	216.0	216.3	216.6	216.9	217.2	217.5	217.8	218.1	218.4	218.7	219.0	219.3	219.6	219.9	220.2	220.5	220.8	221.1	221.4	221.7	222.0	222.3	222.6	222.9	223.2	223.5	223.8	224.1	224.4	224.7	225.0	225.3	225.6	225.9	226.2	226.5	226.8	227.1	227.4	227.7	228.0	228.3	228.6	228.9	229.2	229.5	229.8	230.1	230.4	230.7	231.0	231.3	231.6	231.9	232.2	232.5	232.8	233.1	233.4	233.7	234.0	234.3	234.6	234.9	235.2	235.5	235.8	236.1	236.4	236.7	237.0	237.3	237.6	237.9	238.2	238.5	238.8	239.1	239.4	239.7	240.0	240.3	240.6	240.9	241.2	241.5	241.8	242.1	242.4	242.7	243.0	243.3	243.6	243.9	244.2	244.5	244.8	245.1	245.4	245.7	246.0	246.3	246.6	246.9	247.2	247.5	247.8	248.1	248.4	248.7	249.0	249.3	249.6	249.9	250.2	250.5	250.8	251.1	251.4	251.7	252.0	252.3	252.6	252.9	253.2	253.5	253.8	254.1	254.4	254.7	255.0	255.3	255.6	255.9	256.2	256.5	256.8	257.1	257.4	257.7	258.0	258.3	258.6	258.9	259.2	259.5	259.8	260.1	260.4	260.7	261.0	261.3	261.6	261.9	262.2	262.5	262.8	263.1	263.4	263.7	264.0	264.3	264.6	264.9	265.2	265.5	265.8	266.1	266.4	266.7	267.0	267.3	267.6	267.9	268.2	268.5	268.8	269.1	269.4	269.7	270.0	270.3	270.6	270.9	271.2	271.5	271.8	272.1	272.4	272.7	273.0	273.3	273.6	273.9	274.2	274.5	274.8	275.1	275.4	275.7	276.0	276.3	276.6	276.9	277.2	277.5	277.8	278.1	278.4	278.7	279.0	279.3	279.6	279.9	280.2	280.5	280.8	281.1	281.4	281.7	282.0	282.3	282.6	282.9	283.2	283.5	283.8	284.1	284.4	284.7	285.0	285.3	285.6	285.9	286.2	286.5	286.8	287.1	287.4	287.7	288.0	288.3	288.6	288.9	289.2	289.5	289.8	290.1	290.4	290.7	291.0	291.3	291.6	291.9	292.2	292.5	292.8	293.1	293.4	293.7	294.0	294.3	294.6	294.9	295.2	295.5	295.8	296.1	296.4	296.7	297.0	297.3	297.6	297.9	298.2	298.5	298.8	299.1	299.4	299.7	300.0

Section 1		Section 2		Section 3		Section 4	
Item	Value	Item	Value	Item	Value	Item	Value
1.1	100	2.1	200	3.1	300	4.1	400
1.2	200	2.2	300	3.2	400	4.2	500
1.3	300	2.3	400	3.3	500	4.3	600
1.4	400	2.4	500	3.4	600	4.4	700
1.5	500	2.5	600	3.5	700	4.5	800
1.6	600	2.6	700	3.6	800	4.6	900
1.7	700	2.7	800	3.7	900	4.7	1000
1.8	800	2.8	900	3.8	1000	4.8	1100
1.9	900	2.9	1000	3.9	1100	4.9	1200
1.10	1000	2.10	1100	3.10	1200	4.10	1300

**SAS 7
PENUTUP**

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD) Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bitar Tahun 2016, berikut adalah beberapa hal penting yang perlu disampaikan:

1. Penyusunan RENJA OPD disusun dengan memprioritaskan keterlibatan antara program dan kegiatan dalam Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Perikanan serta Rencana Kerja Kementerian Daerah (RKPD).
2. Penguatan visi dan misi berdasarkan RPMD dan Rencana 2010-2019 menjadi landasan dalam merumuskan program, kegiatan tahunan, serta kebijakan dan strategi. Hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki dan mengatasi kendala yang ada dalam pencapaian tujuan organisasi.
3. Fokus utama program tahun 2016 diarahkan pada peningkatan produksi baik perikanan maupun komoditas peternakan melalui pemberdayaan masyarakat dan peningkatan grade unggulan ternak dan perikanan. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat mewujudkan peningkatan ketahanan pangan dan pengembangan hilirisasi pertanian.

Dengan demikian, Rencana Kerja 2016 ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan untuk mewujudkan tujuan yang lebih luas dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bitar di sektor peternakan dan perikanan.

Bitar, 15 Agustus 2015
KEPALA DINAS PETERNAKAN
DAN PERIKANAN KABUPATEN BITAR

DID SUWANTO, ST., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 1964073119970031003







BAB V PENUTUP

Kemasa Depan Organisasi Perangkat Daerah (KEMDA OPD) Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi Tahun 2025, berikut adalah beberapa hal penting yang perlu diperhatikan:

1. Dengan KEMDA OPD harus dapat dengan memperbaiki keseluruhan antara program dan kegiatan dalam Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Perikanan serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Peningkatan visi dan misi berdasarkan RPMD dan Rencana 2025-2029 menjadi landasan dalam merencanakan program, kegiatan tahunan, serta kebijakan dan strategi. Hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki dan mengatasi kendala yang ada dalam mencapai tujuan organisasi.
3. Fokus utama program tahun 2026 diarahkan pada peningkatan produktivitas perikanan maupun kesehatan peternakan melalui pemberdayaan masyarakat dan peningkatan produk unggulan ternak dan perikanan. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan beta kaum pangan dan pengembangan ekonomi pertanian.

Dengan demikian, Rencana Kerja 2026 ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan untuk mewujudkan target yang telah ditetapkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sukabumi di sektor peternakan dan perikanan.

15 Agustus 2025
KADALOKUMAS PETERNAKAN
DINAS PERIKANAN KABUPATEN SUKABUMI

IRENA HAMITO, ST, M.Si
Pembina Utama Muda
HP. 08967011997631800

